



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR **1** TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disebut DPRD Adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan pembangunan disertai kerangka pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib, dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif;
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perencanaan untuk masa 5 (lima) tahunan;
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (5) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari;
 1. BAB I : PENDAHULUAN
 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 3. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 4. BAB IV : PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 5. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 9 Januari 2026



Diundangkan di Manna
pada tanggal 9 Januari 2026



KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkenan-Nya Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan. Dokumen RENSTRA merupakan implementasi terhadap visi dan misi Kepala Daerah sebagai langkah perwujudan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka menyikapi isu-isu strategis yang berkembang dalam skala daerah, regional dan nasional.

Dokumen RENSTRA ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana terhadap kewenangan yang diberikan Kepala Daerah dalam urusan dibidang Pertanian khususnya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. RENSTRA ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang selama ini agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yakni **"Meningkatnya Daya Saing Daerah Pada Sektor Pertanian"** yang ditandai dengan **"Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Petani"** akan dapat terwujud.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



DINAGRANSYA, SP., MM
Nip. 19720617 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian	
2.1.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian	17
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	30
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	60
2.1.5. Mitra Pelayanan	60
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian	
2.2.1. Permasalahan dan Isu Strategis	62
2.2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian	63
 BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan	65
3.2. Sasaran	65
3.3. Strategi	66
3.4. Arah Kebijakan	66
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	71
4.2. Sub Kegiatan Mendukung Progran Prioritas Pembangunan Daerah	75
4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	75
4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)	76
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Kaidah Pelaksanaan	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Status	17
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang sudah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim)	18
Tabel 2.4a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan Serta Distribusi Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	18
Tabel 2.4b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan Serta Distribusi Pegawai di UPTD dan Non UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	19
Tabel 2.5. Jumlah Kendaraan Operasional	21
Tabel 2.6. Jumlah Alat dan Mesin Pertanian Yang Tersebar Di Kabupaten Bengkulu Selatan	22
Tabel 2.7. Alat dan Mesin Pertanian Brigade Alsintan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	23
Tabel 2.8. Alat Medis dan Operasional Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	24
Tabel 2.9. UPTD Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	25
Tabel 2.10. Daftar UPTD Subsektor Peternakan	25
Tabel 2.11. Daftar Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan Kelembagaan Non Struktural Lainnya Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	35
Tabel 2.12. Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan Jumlah Kelompok Binaan di Kabupaten Bengkulu Selatan	36
Tabel 2.13. Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan	27
Tabel 2.14.1. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan	28
Tabel 2.14.2. Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan	28
Tabel 2.15. Daftar Infrastruktur Pertanian yang dibangun Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Melalui Dana APBD/APBN Tahun 2016-2024	28
Tabel 2.16. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.17. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.18. Luas Lahan, IP, Luas Panen, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024	33
Tabel 2.19. Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen Produksi Jagung di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020- 2024	34
Tabel 2.20. Perkembangan Produksi Hortikultura (Sayuran) di Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024	34
Tabel 2.21. Perkembangan Produksi Hortikultura (Buah) di	

	Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024	34
Tabel 2.22	Populasi, Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.23	Populasi, Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Potong di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.24	Populasi, Produksi dan Konsumsi Daging Kerbau di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.25	Populasi, Produksi dan Konsumsi Daging Kambing di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.26.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Perkebunan</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.27.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kelapa Sawit</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.28.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Karet</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.29.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kopi Robusta</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.30.	Luas Areal dan Produksi Komoditi <i>Kelapa</i> Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	38
Tabel 2.31.	Rencana Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024	39
Tabel 2.32.	Kelembagaan Pertanian di Kab. Bengkulu Selatan	60
Tabel 2.33.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan	64
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	65
Tabel 3.2.	Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	67
Tabel 4.1.	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	75
Tabel 4.1.	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsep RENSTRA	2
Gambar 2. Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD	2
Gambar 3. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	70

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Capaian NTUP Tahun 2020 s/d 2024.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 520.343 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
2. Cascading Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029;
3. Matrik Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Rencana Penganggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

PENETAPAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2025-2029

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



BINAGRANSYA, SP., MM
Nip. 19720817 199803 1 006

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian agar proses pembangunan daerah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dibidang pertanian yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memastikan proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dan sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

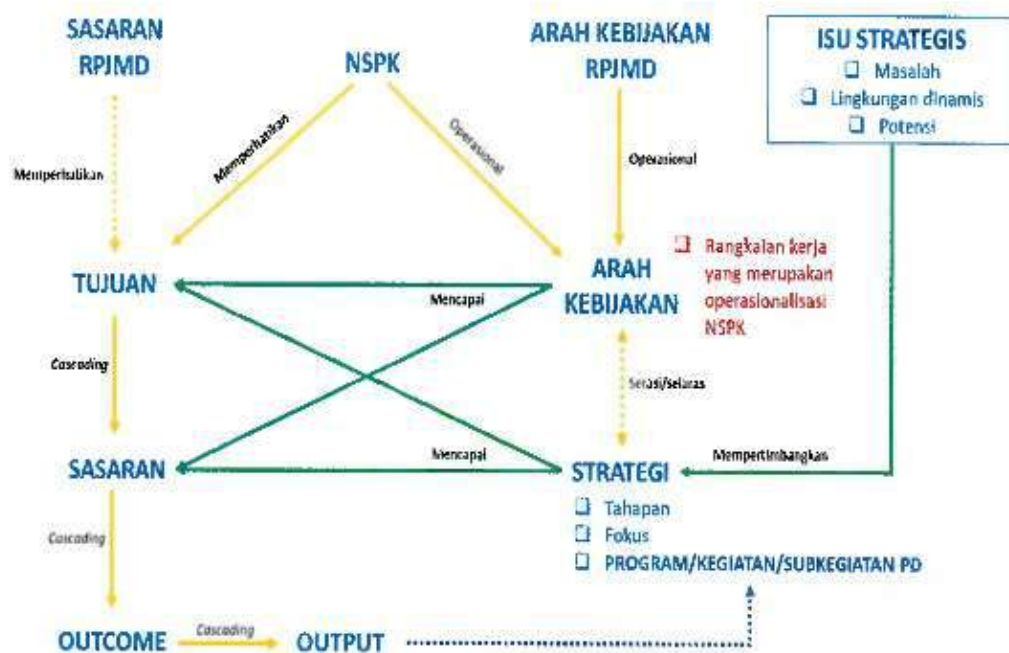
RENSTRA, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang didalamnya memuat tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata serta menampung aspirasi masyarakat.

Proses penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- Pertama : Persiapan penyusunan RENSTRA** yang meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- Kedua : Penyusunan rancangan RENSTRA** yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan RENSTRA dan tahap penyajian rancangan RENSTRA;
- Ketiga : Penetapan RENSTRA** Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

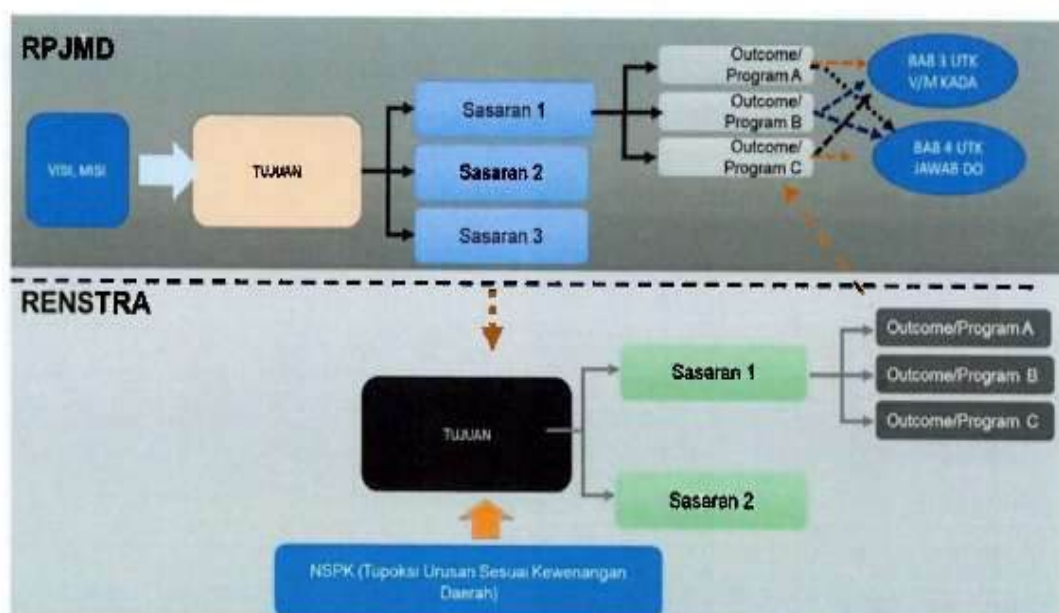
Konsep RENSTRA perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tertera pada Gambar berikut ini.

Gambar 1. Konsep RENSTRA



Sedangkan keterkaitan Tujuan RENSTRA dengan Sasaran dalam RPJMD dijelaskan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 2. Keterkaitan RENSTRA dengan RPJMD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu Tahun 2012 -2032;
 31. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011, Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 - 2045; dan
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
36. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan pertanian yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

Secara lebih spesifik, RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran program pembangunan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perternakan dan perkebunan tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2029 adalah sebagai perumusan dan penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan strategi dan kebijakan serta program/kegiatan pembangunan sesuai mandatori/kewenangan penanganan bidang urusan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Memuat latar belakang penyusunan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya dokumen RENSTRA yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis RENSTRA;
- b. Identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RENSTRA yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum;
- c. Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA;
- d. Uraian ringkas tentang muatan dari masing-masing BAB yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- a. Menyajikan data dan informasi yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2000 samapai dengan tahun 2024 dan data dan informasi lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data yang tersaji telah dilakukan analisis dengan analisa deskriptif dan diagnostik;
- b. Memuat hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan periode 5 (lima) tahun terakhir terkait capaian IKU dan IKK;
- c. Menyajikan tabel, grafik dan gambar dari data dan informasi yang disampaikan;
- d. Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelaksanaan, kelompok sasaran pelayanan, dan informasi lain yang diselenggarakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;

- e. Identifikasi dan perumusan permasalahan yang bersifat dominan dan isu strategis yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian, RPJMD dan hasil penjangkaran dari aspirasi berbagai pihak;

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- a. Memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode RENSTRA;
- b. serta strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- a.** Memuat Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan , sasaran, outcome dan output;
- b.** Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode RENSTRA.

BAB V PENUTUP

Memuat hasil Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 yang mencakup hal-hal :

- a. Kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang menjadi target dan kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Kesesuaian indikator dan target kinerja;
- c. Kesesuaian target kinerja dengan evaluasi hasil capaian kinerja dari RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2020-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian

2.1.1. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8).

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah.

Fungsi

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanian;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang Pertanian ;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; terdiri dari :
 - 2.1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
4. Bidang Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura
5. Bidang Perkebunan;
6. Bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Bidang Penyuluhan; dan
8. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Sekretariat

- (1) Sekretariat bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pertanian;
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Pertanian;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Pertanian;
 - d. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
 - e. Pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
 - g. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
 - h. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Pertanian;

- j. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Pertanian;
 - k. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian;
 - l. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- (4) Pelaksanaan teknis operasional fungsi kesekretariatan dijalankan oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - b.1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b.2. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
 - b.3. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan system informasi kepegawaian;
 - b.4. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
 - b.5. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang pertanian;
 - b.6. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b.7. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b.8. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b.9. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - b.10. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat;
 - b.11. Koordinasi penyiapan bahan angka kredit jabatan fungsional tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; dan
 - b.12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri atas :
 - c.1. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, yang menyelenggarakan fungsi :
 - c.1.1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c.1.2. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - c.1.3. Koordinasi dan penyusunan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
 - c.1.4. Penyiapan, pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - c.1.5. Pelaksanaan pengendalian evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c.1.6. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c.1.7. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c.1.8. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
 - c.1.9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
 - c.2. Kelompok Substansi Keuangan, yang menyelenggarakan fungsi:
 - c.2.1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c.2.2. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan keuangan dan anggaran dinas;
 - c.2.3. Pengolaan anggran dinas;
 - c.2.4. Penatausahaan administrasi keuangan dinas;
 - c.2.5. Penyusunan dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan dinas secara berkala;
 - c.2.6. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
 - c.2.7. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan dinas;
 - c.2.8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;

- c.2.9. Pengevaluasian pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c.2.10. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian

- (1) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi
 - 3.2. Kelompok Substansi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3.3. Kelompok Substansi Alat dan Mesin Pertanian.
- (4) Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Bidang Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi produksi tanaman pangan dan Hortikultura;
 - 3.2. Kelompok Substansi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura;
 - 3.3. Kelompok Substansi pengolahan dan pemasaran Hasil tanaman pangan dan Hortikultura.

- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan Hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perkebunan

- (1) Bidang Perkebunan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Bidang Perkebunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi perbenihan dan perlindungan Perkebunan;
 - 3.2. Kelompok Substansi produksi tanaman perkebunan;
 - 3.3. Kelompok Substansi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- (4) Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;

- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak;
 - 3.2. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
 - 3.3. Kelompok Substansi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan
- (4) Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Peternakan dan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan;
 - j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
 - k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

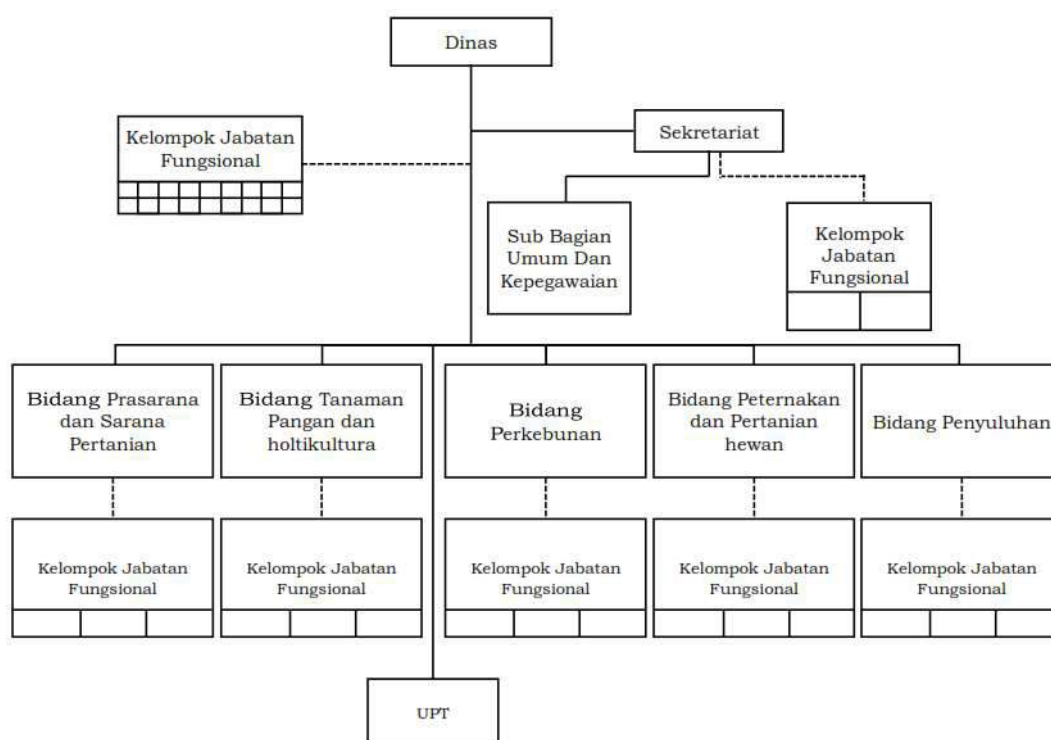
Bidang Penyuluhan

- (1) Bidang Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang;
- (3) Bidang Penyuluhan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - 3.1. Kelompok Substansi Kelembagaan;
 - 3.2. Kelompok Substansi Ketenagaan;
 - 3.3. Kelompok Substansi Metode Dan Informasi.
- (4) Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melaksanakan butir kegiatan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian yang ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari berbagai jenis tingkatan pendidikan dan berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja masing-masing pegawai untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

A. Kondisi Umum Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Status

No	Golongan/Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	24 orang	
2.	Golongan III	78 orang	
3.	Golongan II	13 orang	
4.	Golongan I	-	
5.	PPPK	50 Orang	
6.	PPPK Paruh Waktu	22 orang	
7.	Tenaga Outsourcing	35 Orang	
Jumlah		222 Orang	100.00

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Strata 2 (S 2)	8 Orang	
2.	Strata 1 (S 1)	159 Orang	
3.	Diploma 4 (D 4)	-	
4.	Diploma 3 (D 3)	15 Orang	
5.	Diploma 1 (D 1)	-	
6.	SLTA / SMK	33 Orang	
7.	SLTP	3 Orang	
8.	SD	4 Orang	
Jumlah		222 Orang	100.00

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Jumlah pegawai/pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai yang sudah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepimimpinan (Diklatpim)

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	1
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	3

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Tabel 2.4a
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan serta Distribusi Pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jabatan	Sekretariat	Bidang TPH	Bidang Perkebunan	Bidang Peternakan	Bidang PSP	Bidang Penyuluhan	Jumlah
1	Struktural							
	b. Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
	c. Eselon III	1	1	1	1	1	1	6
	d. Eselon IVa	3	3	3	3	2	3	17
	e. Eselon IVb	-	-	-	-	-	-	-
2	Fungsional							

	a. Fung. Umum	8	4	3	2	1	2	20
	b. Fung. Tertentu	-	-	-	5	-	-	5
	- Penyuluh	-	-	-	-	-	3	3
	- Pengawas Benih TPH	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengamat OPT	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	2	-	-	2
3	Paruh Waktu dan Out Sourcing							
	a. P3K Paruh Waktu	9	3	1	3	5	1	22
	b. Outsourcing	7	2	1	4	2	2	18
	JUMLAH	28	13	9	20	11	12	93

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Tabel 2.4b
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/Jabatan
serta Distribusi Pegawai di UPTD dan Non UPTD
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jabatan	UPTD Puskeswan Kota Manna	UPTD Puskeswan Air Sulau	UPTD BBTPHP	UPTD RPH	Non UPTD (BPP)	Jumlah
1	Struktural						
	a. Eselon IVa	1	1	1	1	-	4
	b. Eselon IVb	1	1	1	1	-	4
2	Fungsional						
	a. Fung. Umum	-	1	-	-	-	1
	b. Fung. Tertentu						
	- Penyuluh	-	-	-	-	103	103
	- Pengawas Benih TPH	-	-	-	-	-	-
	- Pengamat OPT	-	-	-	-	-	-
	- Pengawas Mutu Pakan	-	-	-	-	-	-
3	Honoror/Magang						
	a. P3K Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-
	b. Outsourcing	2	2	2	1	10	17
	JUMLAH	2	5	4	3	121	129

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

B. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

B.1. Bangunan Kantor, yang terdiri dari :

a. Gedung Utama

Terdiri dari Ruang Kerja dan Ruang tunggu tamu Kepala Dinas yang dilengkapi dengan 1 unit toilet, Ruang Sekretariat (Ruang Kerja Sekretaris Dinas, Ruang Kerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Staf, Ruang Kerja Kelompok substansi Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan dan Staf, Ruang Kerja Kelompok substansi Keuangan dan Barang Milik Daerah dan Staf), Ruang Bidang Perkebunan (Ruang Kerja Kepala Bidang dan Ruang Kerja Kelompok substansi dan Staf Perkebunan), Ruang Bidang Sarana dan Prasarana (Ruang Kerja Kepala Bidang dan Ruang Kerja Kelompok substansi dan Staf Sarana dan Prasarana), Ruang tunggu (dilengkapi dengan Meja Costumer Service dan kursi tamu dinas) serta 2 unit Toilet Umum;

- b. Gedung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang, Ruang Tamu Bidang, Ruang Kerja Kelompok substansi dan staf Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 1 unit toilet;
- c. Gedung Bidang Peternakan
Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang Peternakan, Ruang Tamu Bidang, Ruang kerja Kelompok substansi dan staf Bidang Peternakan serta 1 Unit Gudang penyimpanan Obat-obatan ternak dan 1 unit toilet;
- d. Gedung Bidang Penyuluhan
Terdiri dari Ruang Kerja Kepala Bidang, Ruang Tamu Bidang, Ruang Kerja Kelompok substansi dan staf Bidang penyuluhan dan 1 unit toilet;

B.2. Bangunan Pendukung, terdiri dari :

- a. Aula
Satu (1) unit ruang Pertemuan/rapat berukuran 10 x 8 m dilengkapi dengan fasilitas AC 2 PK sebanyak 2 unit, meja dan kursi, ruang sound system serta 2 gudang penyimpanan dan 1 unit toilet;
- b. Bangunan Garasi dan halaman parkir kendaraan roda 4 dan roda 2
- c. Bangunan Garasi Alat dan mesin pertanian;
- d. Bangunan Gudang yang terdiri dari 2 unit gudang penyimpanan barang/berkas dan aset dinas;
- e. Bangunan Rumah Dinas/Rumah Jaga sebanyak 2 unit;
- f. Bangunan Green House (ukuran 4 x 8 meter);
Rumah tanaman sayuran semusim dan hortikultura yang dilengkapi dengan peralatan pertanian organik untuk contoh pertanian semusim dalam lahan pekarangan/lahan terbatas;
- g. Mushola 1 unit.

B.3. Bangunan UPTD dan BPP

1. Gedung UPTD Puskesmas Kota Manna 1 Unit;
2. Gedung UPTD Puskesmas Sulau 1 Unit;
3. Gedung Balai Benih TPHP 1 unit;
4. Gedung Rumah Potong Hewan 1 unit;
5. Gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di 10 Kecamatan masing-masing 1 unit

Masing masing ruang kerja kesekretariatan dan bidang serta UPTD dan BPP sebagaimana tersebut diatas telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja seperti meja dan kursi kerja, lemari arsip, peralatan komputer, laptop, printer dan sarana pendukung lainnya serta kotak saran.

B.2. Kendaraan Operasional

Untuk menunjang kinerja dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka para pegawai pada masing masing unit kerja lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah diberikan kendaraan operasional (roda 4 atau roda 2), Jumlah kendaraan operasional tersebut tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Kendaraan Operasional

NO	UNIT KERJA	RODA 4			JUMLAH	RODA 2			JUMLAH
		Baik	Rusak			Baik	Rusak		
			Berat	Ringan			Berat	Ringan	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	1	27	-	-	27
2	Bidang Tanaman Pangan dan	1	-	-	1	13	-	-	13
3	Bidang Perkebunan	1	-	-	1	11	-	-	11
4	Bidang Peternakan	1	-	-	1	18	-	-	18
5	Bidang Sarana dan Prasarana	1	-	-	1	14	-	-	14
6	Bidang Penyuluhan	1	-	-	1	10	-	-	10
7	UPTD Puskesmas Kota Manna	-	-	-	-	2	-	-	2
8	UPTD Puskesmas Air Sulau	-	-	-	-	2	-	-	2
9	UPTD Balai Benih	-	-	-	-	2	-	-	2
10	UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	-	-	-	-	2	-	-	2
11	Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	-	-	-	-	102	-	-	102
12	Di Gudang Dinas Roda 2 Roda 3	-	-	-	-	-	-	10	10
		-	-	-	-	-	-	4	4
JUMLAH		7	-	-	7	204	-	14	216

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

B.3. Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian

Dalam mendukung penerapan teknologi, ketersediaan alat dan mesin pertanian memegang peranan penting untuk memberikan kemudahan dan efektifitas usaha pertanian. Ketersediaan alat dan mesin pertanian sangat membantu masyarakat dalam usaha tani yang dilakukan dan diyakini mampu memberikan efektifitas dan efisiensi waktu dan biaya usaha.

Data statistik alat dan mesin Pertanian yang diperoleh dari petugas pencacah data statistik alat dan mesin pertanian yang tersebar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Se-Kabupaten Bengkulu selatan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersebar
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis Alat/Mesin Pertanian	Kondisi Baik/Rusak Ringan*)	Rusak Berat **)	Jumlah (3) + (4)
1	Pengolahan Lahan	a. Traktor roda Dua	386	628
		b. Traktor roda empat	32	-
2	Penanaman	a. Tanam Padi (Transplanter)	21	-
		b. Tanam biji-bijian (seeder)	13	1
3	Pengairan	Pompa Air		
		a. < 4 inci	2	-
		b. 4 inci	134	2
		c. > 4 inci	48	4
4	Pemanenan	a. Rice Combine Harvester		
		1) Combine Harvester Kecil	1	5
		2) Combine Harvester Menengah	10	-
		3) Combine Harvester Besar		
		- Corn Combine Harvester	-	1
5	Perontok/Pemipilan	a. Perontok Padi / Thresher	686	180
		b. Pemipil Jagung / Consheller	76	7
		c. Perontok Multi Guna (Padi, Jagung, Kedelai)	32	19
6	Pembersih	Pembersih Gabah / Winower	2	2
7	Pengeringan	a. Pengering tipe datar / Flat Bed Dryer	1	-
		b. Pengering tipe vertikal / Vertical Dryer	5	-
8	Penggilingan	a. Penggilingan Padi Kecil / Small Rice Milling	23	2
		b. Penggilingan Padi Menengah / Medium Rice Milling	86	7
		c. Penggilingan Padi Besar / Large Rice Milling	10	7
9	Penyimpanan	Penyimpanan hasil tanaman pangan (silo)	1	-

10	Pembuatan Pupuk	Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO)/Kompos	25	7	32
----	-----------------	--	----	---	----

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Disamping alat dan mesin pertanian sebagaimana tertera pada tabel diatas, Dinas Pertanian memberikan pelayanan jasa operasional Alat dan Mesin Pertanian yang bernama Brigade Alsintan dengan jenis-jenis peralatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Alat dan Mesin Pertanian Brigade Alsintan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian / Jenis Alsintan	Merk-Model/Type	Volume	Kondisi
A	BRIGADE ALSINTAN (Pengolahan Lahan)			
1	Excavator	Volvo EC 55B Pro	3 Unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
2	Traktor Roda 4 -Multiguna	a. Pindad PTM 45	2 Unit	Rusak Berat
		b. Dongfeng Gatra GT 3 498	2 Unit	Rusak Berat
3	Trantor Roda 4	a. Iseki - NT540F	4 Unit	Baik
		b. Jhon Deere JD5045 MFWD	1 Unit	Rusak Berat
4	Pompa Air	a. Niagara - GTO-4-0	3 Unit	Rusak Berat
		b. Tanikaya - TWP 30	3 Unit	Rusak Berat
		c. EBARA100SQPB	5 Unit	Baik
		d. Shark SP200	5 Unit	Baik
5	Rice Transplanter	a. LJ Jajar Legowo - RTP 2040	4 Unit	Baik
		b. Iseki - PC4	8 Unit	Baik
6	Traktor Roda 2	a. Yanmar YST Pro XL	3 Unit	Rusak Ringan
		b. Kubota - Quick G 3000 Zeva	1 Unit	Rusak Berat
7	Grain Seeder	Crown - ATJK 500	4 Unit	Rusak Berat
8	Cultivator	Quick Cakar Baja	1 Unit	Rusak Berat
	Jumlah	-	43 Unit	
B	BRIGADE ALSINTAN (Pengelolaan Panen dan Pasca Panen)			
1	Combine Harvester Kecil (CHK)	JAVATECH	4 Unit	4 Rusak Ringan
2	Power Threaser	Pura Inari	5 Unit	Baik
		Arjuna Ireng Tipe AL 65	6 Unit	Baik
		Ishoku PTP 500 GP	6 Unit	Baik
		RAI-PP 1000	5 Unit	Baik
		PRT 1000	8 Unit	Baik
		BEJE PWT 1000 D	5 Unit	Baik
		Tanikaya	5 Unit	Baik
3	Corn Seler	RAI-PJI200B	5 Unit	Baik
		BEJE UK 09 B	10	Baik
		TANIKAYA	2	Baik
		JAVATECH	5	Baik
		BEJE UK 22 N	10	Baik
4	Combine Harvester Sedang (CHS)	Crown DCH-9270 Dewi Sri	6	Baik
5	Combine Harvester Besar (CHB)	Maxi G-Automatic	9 Unit	8 Baik, 1 Rusak Berat

		UMG Matador MH88B	1	Baik
		Kubota DC-60	1	Rusak Ringan
		Ranger G-8	1	Rusak Berat
		Gunung Biru/MCB-200	6	4 Baik 2 Rusak Ringan
	Jumlah	-	100 Unit	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Sektor peternakan juga dilengkapi dengan sarana penunjang operasional untuk tenaga medis dan para medis peternakan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat, beberapa peralatan penunjang tugas pokok dan fungsi sektor peternakan yang tersedia di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Peralatan Medis dan Operasional Peternakan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bidang/UPTD	Jenis Peralatan	Volume (unit/set)	Kondisi
1	Bidang Peternakan	Lemari Es Show Chase Tabung N2 Cair 50L	1 1 2	Baik Baik Baik
2	Puskesmas Manna	Cool BOX Mikroskop Centrifuge 8 Tabung Erlenmayer 50 ml Erlenmayer 100 ml Erlenmayer 250 ml Gelas Ukur 100 ml Tabung Hematoknit Pipet (Ukur) Tabung N2 Cair 1,5L Tabung N2 Cair 30L Tongkat Ukur Ternak Mayor Set Surgerry Minor Set Surgerry Gun IB Sepatu Boots Filling Kabinet Kursi Plastik Vaksin Injeksi Termometer Digital Timbangan Sapi 2 Ton	2 1 1 4 1 2 1 50 5 1 1 2 1 1 4 8 1 25 2 1 1	Baik Baik
3	Puskesmas Sulau	1. Tabung N2 Cair 1,5L 2. Tabung N2 Cair 30L 3. Tongkat Ukur Ternak 4. Mayor Set Surgerry 5. Minor Set Surgerry 6. Gun IB 7. Sepatu Boots 8. Filling Kabinet 9. Kursi Plastik 10. Vaksin Injeksi 11. Termometer Digital Timbangan Sapi 2 Ton	1 1 2 1 1 5 8 1 25 2 1 1	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

SumberData : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

C. Kelembagaan Pertanian Struktural dan Non Struktural

C.1. UPTD Balai Benih

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya produksi adalah benih/bibit yang digunakan. Untuk

memenuhi kebutuhan benih/bibit diperlukan institusi yang menangani perbenihan/perbibitan. Institusi yang menangani perbenihan/ perbibitan di Bengkulu Selatan adalah balai benih. Di Kabupaten Bengkulu Selatan pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terdapat 1 (satu) balai benih sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.9
UPTD Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

No	Nama Kelembagaan	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1	UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	16,5	Kota Manna	Padi, Jagung dan Buah-buahan Hortikultura dan Lokasi Pembibitan Tanaman Perkebunan

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

C.2. UPTD Puskesmas dan Rumah Potong Hewan

Institusi yang menangani sub sektor Peternakan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang berjumlah 2 (dua) unit dan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) berjumlah 1 (satu) unit. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Daftar UPTD Subsektor Peternakan

No	Nama Kelembagaan	Luas (Ha)	Lokasi (Kec)	Keterangan
1	UPTD Pos Kesehatan Hewan (Puskesmas) Kota Manna	0,25 Ha	Kota Manna	Layanan Kesehatan Hewan/Ternak
2	UPTD Pos Kesehatan Hewan (Puskesmas) Air Sulau	0,25 Ha	Kedurang Ilir	Layanan Kesehatan Hewan/Ternak
3	UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)	0,10 Ha	Kota Manna	Layanan pemotongan Hewan/Ternak

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

C.3. Kelembagaan Pertanian Non Struktural

Disamping UPTD, Dinas Pertanian memiliki kelembagaan non struktural, seperti Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Hijauan Makanan Ternak dan Kebun Dinas. Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan HKT dan Kebun Dinas merupakan kawasan produksi

sumber pakan ternak dan areal perkebunan penghasil PAD Dinas disektor Perkebunan. Kelembagaan non struktural sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Daftar Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
dan Kelembagaan Non Struktural Lainnya Lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Institusi	Lokasi	Klasifikasi
1	BPP Pino Raya	Desa Selali	Madya
2	BPP Pino	Desa Batu Bandung	Pratama
3	BPP Ulu Manna	Desa Keban Jati	Pratama
4	BPP Kota Manna	Kelurahan Kota Medan	Madya
5	BPP Manna	Kelurahan Kayu Kunit	Madya
6	BPP Bunga Mas	Desa Gindosuli	Pratama
7	BPP Seginim	Desa Banding Agung	Madya
8	BPP Air Nipis	Desa Tanjung Beringin	Pratama
9	BPP Kedurang Ilir	Desa Air Sulau	Madya
10	BPP Kedurang	Desa Tanjung Alam	Pratama
11	Hijauan Makanan Ternak (HMT)	Desa Selali	-
12	Kebun Dinas Sawit dan Karet	Desa Selali	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Ketersediaan penyuluh bukan hanya dilihat pada kuantitas, namun kualitas SDM penyuluh mutlak menjadi perhatian karena mereka merupakan *pionner* yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pentransferan ilmu pengetahuan baik teknis maupun administrasi kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok tani. Untuk itu perlu diperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi pelayanan disamping kemampuan dan kapasitas personal para penyuluh perlu terus ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya zaman yang telah memasuki basis digital, hal ini bertujuan agar proses perubahan sikap dan perilaku petani dalam proses transfer ilmu pertanian akan berjalan sesuai arah dan tujuan pembangunan yang diinginkan.

Ketersediaan tenaga PPL serta rasio terhadap kelompok binaan masing-masing kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)
Terhadap Jumlah Kelompok Binaan di Kabupaten
Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan				Gender		Jumlah	Klp. Binaan	Rasio Ketersediaan Penyuluh
		SMA	DIII	DIV	S1/S2	P	L			
1	Pino Raya	1	2	4	4	3	8	11	232	1 : 21
2	Pino	-	1	3	8	5	7	12	172	1 : 14
3	Ulu Manna	-	1	2	5	2	6	8	103	1 : 12

4	Kota Manna	1	-	2	7	5	4	9	102	1 : 11
5	Manna	-	1	3	7	6	5	11	156	1 : 14
6	Bunga Mas	-	2	1	5	3	5	8	105	1 : 13
7	Seginim	-	2	7	6	6	9	15	288	1 : 19
8	Air Nipis	1	-	4	4	-	9	9	173	1 : 19
9	Kedurang Ilir	-	1	1	6	1	7	8	113	1 : 14
10	Kedurang	1	-	4	7	2	10	12	168	1 : 14
11	KJF Kab	-	-	1	1	-	3	3	-	-
JUMLAH		4	9	32	60	33	73	106	1.612	Rata Rata Kabupaten 1 : 15

Sumber Data : Data Update Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

D. Sumberdaya Lahan

Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai wilayah seluas 118.610 Ha, dengan pemanfaatan lahan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
A.	LAHAN PERTANIAN	
1.1.	LAHAN SAWAH	7.807
1.2.	LAHAN BUKAN SAWAH	107.783
	- Tegal/Kebun	611
	- Ladang/Huma	1.115
	- Perkebunan	34.805
	- Ditanami pohon/ Hutan Rakyat	18.109
	- Pengembalaan/Padang Rumput	2
	- Hutan Negara	48.930
	- Sementara tidak diusahakan	4.146
	- Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	65
B.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan,pemukiman, perkantoran, sungai, dll)	3.020
Jumlah		118.610

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Peran pengairan adalah faktor utama atau kunci keberhasilan sektor pertanian, air merupakan kebutuhan mutlak dalam usaha pertanian, maka perlu secara serius mengupayakan ketersediaan pengairan bagi lahan pertanian secara berkelanjutan.

Data Luas lahan sawah dan lahan bukan sawah berdasarkan status pengairannya yang tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14.1
Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan
Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Irigasi /Kecamatan	Pino	Ulu Manna	Pino Raya	Manna	Bunga Mas	Kota Manna
1	Irigasi Teknis	-	-	-	-	-	-
2	Irigasi ½ teknis	-	-	-	-	-	-
3	Irigasi sederhana	90	21	94	84	24	-
4	Irigasi desa/non PU	463	205	692	70	137	32
5	Tadah Hujan	219	27	370	329	217	89
6	Pasang Surut	-	-	-	13	18	-
7	Lebak/Rawa	23	-	63	-	-	-
Jumlah		795	253	1.219	496	396	121

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.14.2
Luas Lahan Sawah Berdasarkan Status Pengairan
Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis Irigasi /Kecamatan	Pasar Manna	KDR	KDI	Sgnm	Air Nipis	Jumlah
1	Irigasi Teknis	-	823	-	1.376	813	3.012
2	Irigasi ½ teknis	-	-	151	354	412	917
3	Irigasi sederhana	13	-	54	61	115	554
4	Irigasi desa/non PU	41	-	38	-	76	2.320
5	Tadah Hujan	35	22	66	27	27	862
6	Pasang Surut	-	-	-	-	-	31
7	Lebak/Rawa	-	-	23	-	-	109
Jumlah		89	845	332	1.818	1.443	7.807

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

E. Ketersediaan Infrastruktur Pertanian

Dalam periode RENSTRA 2016-2021 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur di beberapa kecamatan. Secara rinci Daftar infrastruktur pertanian yang dibangun, ditingkatkan dan direhabilitasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Daftar Infrastruktur Pertanian Yang Dibangun
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Melalui Dana APBD/APBN Tahun 2016-2024

No	Jenis	Volume (Meter/Unit)								
		2016			2017			2018		
		DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN
A	PEMBANGUNAN									
	1. Embung	-	4	-	-	10	1	-	11	1
	2. Dam Parit	-	10	-	-	10	-	-	9	-
	3. Jaringan Irigasi Tersier	-	-	10	-	-	9	-	-	-
	4. Jalan Sentra Produksi	18	-	-	17	-	-	3	-	13
	5. Jalan Usaha Tani	4	-	-	-	-	-	12	-	-
B	PENINGKATAN									
	1. Embung	-		-	-	-	-	-	-	-
	2. Dam Parit	-		-	-	-	-	-	-	-
	3. Jaringan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Tersier									
4.	Jalan Sentra Produksi	1	-	-	13	-	-	8	-	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	REHABILITASI									
1.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Lanjutan.....

No	Jenis	Volume (Meter/Unit)								
		2019			2020			2021		
		DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN	DAU	DAK	APBN
A	PEMBANGUNAN									
1.	Embung	-	11	1	-	5	1	-	-	-
2.	Dam Parit	-	-	14	-	4	11	-	-	1
3.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	19
4.	Jalan Sentra Produksi	10	-	-	-	-	-	7	1	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	7	1	4
B	PENINGKATAN									
1.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan Sentra Produksi	5	-	-	-	-	-	6	-	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C	REHABILITASI									
1.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabel Lanjutan.....

No	Jenis	Volume (Meter/Unit)								
		2022			2023			2024		
		DAU	DAK	TP	DAU	DAK	TP	DAU	DAK	TP
A	PEMBANGUNAN									
1.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	4	-
3.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6.	Bangunan Bank Pakan Ternak	-	-	-	-	2	-	-	4	-
B	PENINGKATAN									
6.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	7	-
10.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	REHABILITASI									
7.	Embung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Dam Parit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Jaringan Irigasi Tersier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Jalan Sentra Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Jalan Usaha Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode RENSTRA tahun 2021-2026 dikelompokkan sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang disampaikan secara periodik (tahunan), menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pertanian belum mampu sepenuhnya mencapai target yang diharapkan, masih banyak capaian yang jauh dari target yang ditetapkan, meskipun pada kondisi berbeda, beberapa indikator lainnya sudah memperlihatkan perubahan yang signifikan.

Grafik 1.

Capaian NTUP Tahun 2020 s/d 2024



Faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja pelayanan dalam kurun waktu tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinergi antar sub sektor belum terjalin secara baik, dimana hal ini perlu dilakukan karena beberapa permasalahan yang terjadi dalam mengejar target kinerja kunci yang ditetapkan oleh setiap unit kerja sebenarnya dapat teratasi ketika komunikasi dan sinkronisasi program antar lini terjalin dengan baik. Dengan mengesampingkan ego sektoral;
- Masih rendahnya SDM Dinas Pertanian dalam penguasaan data teknis;
- Sistem Pengendalian internal yang masih lemah dan cenderung terabaikan khususnya dalam hal evaluasi kinerja yang seyogyanya perlu dilakukan secara berkala dan kontinyu agar setiap masalah yang timbul dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama;
- Sistem penilaian kinerja belum berjalan secara efektif dan cenderung bersifat prosedural semata hanya untuk pemenuhan terhadap kewajiban administrasi;

- Dukungan anggaran yang kurang memadai, terutama untuk program prioritas yang memerlukan pembiayaan yang relative besar bukan hanya dalam pemenuhan terhadap pembiayaan pekerjaan fisik dan don fisik namun juga terbatas dalam sisi operasional;
- Perubahan iklim global;
- Skala usaha yang dilakukan petani relative kecil karena keterbatasan modal dan belum menerapkan pola mix farming untuk meningkatkan nilai tambah;
- Produksi yang tidak stabil dapat menyebabkan fluktuasi harga pangan, memengaruhi stabilitas pasar;
- Gangguan hama dan penyakit tanaman dan ternak yang berdampak pada penurunan hasil produksi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Dinas Pertanian dalam rangka perbaikan kinerja dimasa depan adalah dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Memastikan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh jajaran di dinas pertanian untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Menetapkan dan mentaati regulasi untuk melindungi, menumbuhkan dan mengembangkan komoditas pertanian yang berbasis kawasan;
3. Mengevaluasi secara berkala progres kinerja melalui rapat-rapat internal untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas penyelesaian atas permasalahan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat;
4. Mendorong dan menciptakan inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan petani;
5. Meningkatkan komunikasi yang efektif dan senantiasa berkoordinasi antar lini terhadap program kegiatan yang dijalankan agar terwujudnya sinergisitas pelaksanaan pelayanan;
6. Menumbuhkembangkan kelembagaan koperasi ditingkat petani dan kelembagaan ekonomi produktif serta unit-unit usaha pengolahan hasil pertanian yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing;
7. Memperbaiki infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan produksi, serta mengembangkan Unit Pengolahan Hasil untuk membantu memasarkan hasil pertanian dan menjadi offtaker produk petani;
8. Melakukan koordinasi yang baik dengan instansi dan lembaga terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas secara efektif.

Secara rinci gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dari tingkat ketercapaian terhadap target kinerja yang ditetapkan selama periode RENSTRA tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKI)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)												
			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)														
1	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	101,49	103,75	103,96	99,87	104,25	105,53	101,17	106,00	107,90	101,80	106,75	111,61	104,45
	a. Tanaman Pangan	103,02	105,00	104,00	99,04	107,00	104,95	98,08	107,00	100,45	93,87	106,00	105,75	99,76
	b. Hotikultura	100,03	105,00	100,80	104,16	105,00	102,60	97,71	105,00	105,15	100,14	105,00	105,00	100,00
	c. Perkebunan	104,80	100,00	110,75	100,75	100,00	110,80	110,08	107,00	115,70	108,13	110,00	125,50	114,09
	d. Peternakan	98,11	105,00	100,30	95,52	105,00	103,75	98,80	105,00	110,30	105,04	106,00	110,20	103,96
B INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)														
1	Produksi Komoditas													
	a. Padi	72.050,76	63,262,08	60,958,83	96,36	63,262,08	51,92	82,07	64.015,20	46.065,00	71,96	64.015,20	48.746,00	76,14
	b. Jagung	35,87	33,600,00	42,454,00	126,35	33.600,00	30,23	89,96	34.200,00	6.752,00	19,74	34.800,70	16.565,00	47,60
	c. Kelapa Sawit	184.200,69	189,174,16	181,610,55	96,00	189.175,00	364.545,28	192,70	365.000,00	314.243,08	86,09	375.175,00	397.90,83	106,91
	d. Karet	2.516,84	2,569,68	2,569,87	96,00	2.675,00	577,95	21,61	550,00	512,70	93,22	520,00	620,40	119,31
	e. Kopi	2.011,30	2,025,00	2,051,91	101,33	2.025,00	959,93	47,40	950,00	877,51	92,37	950,00	1.057,40	111,31
	f. Kelapa	523,88	877,80	893,67	101,85	887,00	651,57	73,46	975,00	947,81	97,21	975,00	654,19	87,10
	g. Sapi	45,96	192,56	176,64	91,73	195,44	159,99	81,86	198,38	151,71	76,47	201,35	126,56	62,86
	h. Kerbau	14,65	16,17	10,96	67,78	16,29	8,69	53,35	16,41	11,66	71,05	16,54	14,87	89,90
	i. Kambing	4,82	11,60	6,63	57,16	2,50	1,97	78,80	3,20	3,00	93,75	4,20	3,79	90,24
2	Kelembagaan													
	Jumlah BPP Klasifikasi Madya	10 Pratama	1 Madya	10 Pratama		2 Madya	2 Madya		4 Madya	4 Madya		6 Madya	6 Madya	
			9 Pratama			8 Pratama	8 Pratama		6 Pratama	6 Pratama		4 Pratama	4 Pratama	
	Jumlah Kelompok Tani Kelas Lanjut	190 Kelompok	200 Kelompok	270 Kelompok		350 Kelompok	527 Kelompok		480 Kelompok	579 Kelompok		720 Kelompok		
	Rasio Ketersediaan Penyuluh Terhadap Jumlah Kelompok Binaan	1 : 16	1 : 14	1 : 15		1 : 14	1 : 15		1 : 14	1 : 14		1 : 14	1 : 14	
3	Sarana dan Prasarana													
	Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan	-	35%	37,85%		60%	65%		70%	72%		80%	74,20%	
	Indeks Pertanaman (IP) Padi		1,62	1,76		1,70	1,79		1,80	1,33		1,90	1,57	
	Persentase tingkat penjaminan usaha dan kemudahan akses	-	7,5%	0,05%		20%	4,53%		40%	15,25%		60%	18,70%	
4	Kesekretariatan													
	Nilai AKIP	B (67,32)	BB	CC (58,71)		BB	B (69,85)		BB	B (69,86)		BB		
	IKM	Baik (80,06)	Baik (85,00)	Baik (81,05)		Baik (85,00)	Baik (78,58)		Baik (85,00)	Baik (81,36)		Baik (85,00)	Baik (80,06)	

B. Perkembangan Statistik Komoditas Pertanian

1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Perkembangan Produksi dan Konsumsi Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Produksi padi sawah dan padi ladang	48.746 ton	46.065 ton	51.917 ton	58.495 ton	59.492 ton
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20%.	27.726 ton	27.639 ton	29.531 ton	33.272 ton	33.839 ton
3	Jumlah penduduk tahun Laporan (estimasi)	170.093 Jiwa	172.162 Jiwa	166.867 Jiwa	166.249 Jiwa	166.249 Jiwa
4	Kebutuhan per kapita per tahun	114,80 Kg	114,80 Kg	114,80 Kg	114,80 Kg	114,80 Kg
5	Jumlah kebutuhan beras	19.527 ton	19.764 ton	19.156 ton	19.085 ton	19.085 ton
6	Surplus beras	8.199 ton	7.875 ton	10.375 ton	14.187 ton	14.754 ton

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.18
Luas Lahan, IP, Luas Panen, dan Produktifitas Padi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Baku Sawah (Ha)	Target Indeks Pertanaman (IP)/Tahun	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produktifitas (Ton/Ha)	Produksi Tahunan (Ton)
1	Pino Raya	1.219	1.73	1.901	4,47	8.502
2	Pino	795	1.76	929	4,50	4.180
3	Ulu Manna	253	1.89	196	4,41	865
4	Kota Manna	121	1.74	150	4,53	679
5	Pasar Manna	89	1.61	78	4,55	355
6	Manna	496	1.83	241	4,54	1.095
7	Bunga Mas	396	1.66	599	4,49	2.688
8	Seginim	1.818	1.99	2.739	4,61	12.536
9	Air Nipis	1.443	1.98	2.318	4,50	10.575
10	Kedurang Ilir	332	1.73	304	4,58	1.367
11	Kedurang	845	1.97	1.280	4,56	5.904
	JUMLAH	7.807	IP Rata-Rata = 1.87	10.735	4.52	48.746
	2023	7.807	1.87	10.369	4.60	46.065
	2022	7.807	1.87	11283	4,60	51.917
	2021	7.807	1.87	12085	3,99	58.495
	2020	7.807	1.87	13.662	4.38	59.492

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.19
Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)		Rata2 Produktifitas (Ton/Ha)	Realisasi (Ton)
			Kotor	Bersih		
1	Pino	834	889	497	5,25	2.611
2	Ulu Manna	356	367	202	5,14	1.039
3	Pino Raya	358	356	201	5,30	1065
4	Manna	630	478	265	5,28	1.398
5	Bunga Mas	492	383	217	5,33	1157
6	Kota Manna	122	101	58	5,24	304
7	Pasar Manna	147	126	70	5,36	375
8	Kedurang	592	567	318	5,36	1.705
9	Kedurang Ilir	658	695	390	5,43	2.116
10	Seginim	615	626	351	5,33	1.870
11	Air Nipis	1226	959	544	5,38	2.925
	Jumlah	6.030	5.547	3.113	5,32	16.565
	2023	2.357	2.370	1.323	5,09	6.752
	2022	5.180	9.429	5.388	5,58	30.227
	2021	13.360	8.822	8.472	4,80	42.360
	2020	3.566	5.667	5.593	4,96	28.105

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.20
Perkembangan Produksi Hortikultura (Sayuran)
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kwintal)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Daun	20	138	96	259	431
2	Kacang Panjang	336	482	754	912	1.253
3	Cabe Merah	245	538	1.139	100	1.750
4	Cabe Rawit	117	153	329	451	756
5	Tomat	176	279	448	620	634
6	Terung	295	449	831	1.146	1.243
7	Buncis	67	89	121	171	194
8	Ketimun	315	526	830	1.256	1.593
9	Kangkung	93	191	245	553	855
10	Bayam	38	74	98	210	216

Tabel 2.21
Perkembangan Produksi Hortikultura (Buah)
di Kabupaten Bengkulu Selatan 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (Kwintal)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	1.451	1.597	1.377	1.001	828
2	Belimbing	321	368	398	344	385
3	Duku/langsat	1.511	2.238		37	970
4	Durian	2.430	8.900	6.100	1.108	4.537
5	Jambu Biji	440	493	534	410	372
6	Jambu Air	287	310	546	252	270
7	Jeruk Siam	4.218	2.382	1.883	2.335	914
8	Mangga	1.529	958	2.363	2.881	3.041
9	Manggis	129	49	223	17	120
10	Nangka/Cempedak	2.861	3.701	5.089	3.635	3.616
11	Nanas	66	85	86	96	87
12	Pepaya	3.121	2.528	4.328	3.473	4.294
13	Pisang	7.098	7.244	8.008	5.782	4.280
14	Rambutan	56	169	70	71	282
15	Salak	1.685	2.163	1.145	503	327
16	Sawo	714	979	844	731	725

17	Sirsak	458	268	312	236	255
18	Sukun	440	493	410	327	658
19	Melinjo	149	249	66	54	149
20	Petai	644	640	787	884	934
21	Jengkol	10.983	4.782	4.558	4.107	3.708
22	Jeruk Besar	7	-	-	3	16
23	Melon	323	188	35	187	383
24	Semangka	1.395	847	613	622	1.166

2. Sub Sektor Peternakan

sektor peternakan mempunyai sifat strategis terhadap perekonomian daerah, antara lain, sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat dan juga menambah pendapatan keluarga. Jumlah investasi dari sektor peternakan cukup tinggi dan sumbangan sub sektor ini terhadap produk domestik regional bruto juga tinggi, bahkan sektor peternakan mampu menjadi input sektor lain, seperti industri pengolahan yang membutuhkan bahan baku sebagian besar dari hasil peternakan.

Data statistik Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode Renstra 2021 – 2026 menunjukkan angka yang fluktuatif terhadap jumlah populasi produksi dan konsumsi. Secara rinci perkembangan data sub sektor peternakan pada tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Populasi, Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Jumlah Peternak (KK)
1	Sapi	15.288	126.10	125.83	3265
2	Kerbau	3.411	20,40	19,57	421
3	Kambing	4.856	8,44	8,30	771
4	Domba	57	0.04	0.02	5
5	Ayam Kampung	72.038	16,64	16,62	19.176
6	Ayam Petelur	39.889	0,94	0,78	15
7	Ayam Pedaging	149,638	118.96	187.25	28
8	Itik	17.558	1,56	1,55	1113
9	Entok	27.080	2,06	1,71	5713

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan 2024

Tabel 2.23
Populasi, produksi dan konsumsi daging Sapi Potong
Di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Jumlah Peternak (KK)
1	Pino Raya	5.552	7,93	7,08	1.381
2	Pino	2.492	4,65	4,03	487
3	Ulu Manna	257	3,93	3,23	35
4	Kota Manna	658	59,73	63,94	113
5	Pasar Manna	371	14,94	15,07	57
6	Manna	1.800	7,93	7,13	359
7	Bunga Mas	1.553	4,18	3,83	233
8	Seginim	695	5,18	4,68	179
9	Air Nipis	467	5,68	5,47	142

10	Kedurang Ilir	1.016	6,25	6,09	185
11	Kedurang	427	5,70	5,28	94
	Jumlah	15.288	126,10	125,83	3.265
	2023	15.423	151,71	144,03	3477
	2022	15.186	159,99	152,31	3477
	2021	17.329	162,88	155,43	2956
	2020	16.577	189,71	179,32	

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan 2024

Tabel 2.24
Populasi, produksi dan konsumsi daging Kerbau
Di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Jumlah Peternak (KK)
1	Pino Raya	1036	1,47	1,42	121
2	Pino	692	1,61	1,55	54
3	Ulu Manna	103	0,80	0,77	18
4	Kota Manna	234	1,43	2,28	31
5	Pasar Manna	74	3,01	3,55	12
6	Manna	285	2,04	1,73	51
7	Bunga Mas	643	3,38	2,59	85
8	Seginim	168	1,65	1,52	19
9	Air Nipis	19	1,47	1,30	10
10	Kedurang Ilir	42	1,44	1,21	3
11	Kedurang	115	2,11	1,65	17
	Jumlah	3.411	20,40	19,57	421
	2023	3.297	11,66	9,28	774
	2022	3.381	8,69	8,10	774
	2021	3.062	6,88	6,35	774
	2020	2.637	16,05	14,21	

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan 2024

Tabel 2.25
Populasi, produksi dan konsumsi daging Kambing
Di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Populasi (Ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Jumlah Peternak (KK)
1	Pino Raya	1093	0,70	0,66	112
2	Pino	140	0,52	0,49	28
3	Ulu Manna	461	0,70	0,62	60
4	Kota Manna	535	1,20	1,84	62
5	Pasar Manna	89	0,83	1,12	39
6	Manna	398	1,03	0,96	148
7	Bunga Mas	197	0,18	0,17	43
8	Seginim	318	0,95	0,75	60
9	Air Nipis	996	0,72	0,58	91
10	Kedurang Ilir	169	0,50	0,44	49
11	Kedurang	460	1,11	0,67	79
	Jumlah	4.856	8,44	8,30	771
	2023	4.727	3,00	2,00	1196
	2022	4.7	1,97	1,87	1196
	2021	5.350	1,63	1,59	1245
	2020	5.1	1,68	1,62	

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Selatan 2024

3. Sub Sektor Perkebunan

Perkembangan Sub Sektor Perkebunan semakin pesat di Kabupaten Bengkulu Selatan, hampir 1/3 dari penutupan

lahan di Kabupaten Bengkulu Selatan berasal dari komoditi ini, khususnya kelapa sawit yang merupakan penunjang utama sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara rinci luas areal dan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Ton)	Rata2 (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Kelapa Sawit	2.390,87	26.908,15	-	29.299,02	397.901.826,95	14.787,41
2	Karet	-	597,60	-	597,60	620.395,46	1.038,15
3	Kopi Robusta	43,05	1.076,97	-	1.120,02	1.057.393,52	981,82
4	Kopi Arabica	-	-	-	-	-	-
5	Kakao	-	156,94	-	156,94	113.757,46	724,85
6	Kelapa Dalam	-	582,12	-	582,12	654.188,94	1.123,80
7	Lada	-	6,41	-	6,41	302,28	47,16
8	Cengkeh	-	24,15	-	18,86	3.208,51	132,86
9	Aren	-	65,07	-	65,07	43.906,82	674,76
10	Kayu Manis	-	-	-	-	-	-
11	Pinang	49,40	185,47	-	234,87	114.313,36	616,34
12	Kapuk	-	-	-	-	-	-
13	Kemiri	-	-	-	-	-	-
14	Vanili	-	-	-	-	-	-
15	Pala	99,44	-	5,00	104,44	-	-
16	Jarak Pagar	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.27
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Sawit
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata2 (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	529,45	9.970,85	-	10.500,30	158.222.632,64	15.868,52
2	Pino	210,57	2.899,43	-	3.110,00	42.173.224,15	14.545,35
3	Ulu Manna	348,10	1.604,85	-	1.952,95	22.628.946,70	14.100,35
4	Seginim	71,50	1.061,65	-	1.133,15	14.839.319,04	13.977,60
5	Air Nipis	115,75	1.301,50	-	1.417,25	14.469.611,91	11.117,64
6	Kedurang	217,00	1.855,24	-	2.072,24	25.603.239,62	13.800,50
7	Kedurang Ilir	198,25	1.964,38	-	2.162,63	28.978.533,76	14.752,00
8	Kota Manna	125,45	2.078,95	-	2.204,40	31.164.499,98	14.990,50
9	Pasar Manna	12,00	160,09	-	172,09	2.210.302,30	13.806,62
10	Bunga Mas	451,30	1.795,12	-	2.246,42	25.809.517,31	14.377,60
11	Manna	111,50	2.216,09	-	2.327,59	31.801.999,55	14.350,50
	Jumlah	2.390,87	26.908,15	-	29.299,02	397.901.826,95	14.787,41
	2023	2.300,87	26.571,06	-	28.871,93	14.243.083,55	11.826,52
	2022	2.057,42	26.748,76	-	28.806,18	364.546.287,31	13.628,53
	2021	2.433,62	12.699,00	19,50	15.122,12	181.610.554,12	14.335,03
	2020	2.245,62	12.808,00	-	15.058,12	189.067.520,00	14.761,67

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.28
Luas Areal dan Produksi Komoditi Karet
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata2 (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	-	71,19	-	71,19	71.652,74	1.006,50
2	Pino	-	111,57	-	111,57	121.399,32	1.088,10
3	Ulu Manna	-	30,82	-	30,82	31.439,48	1.020,10
4	Seginim	-	17,25	-	17,25	17.971,91	1.041,85
5	Air Nipis	-	65,35	-	65,35	66.153,81	1.012,30
6	Kedurang	-	23,06	-	23,06	23.710,75	1.028,22
7	Kedurang Ilir	-	162,48	-	162,48	176.567,02	1.086,70
8	Kota Manna	-	26,12	-	26,12	27.909,22	1.068,50
9	Pasar Manna	-	3,40	-	3,40	3.287,12	966,80

10	Bunga Mas	-	68,16	-	68,16	62.877,60	922,50
11	Manna	-	18,20	-	18,20	17.426,50	957,50
	Jumlah	-	597,60	-	597,60	620.395,46	1.038,15
	2023	-	642,50	-	642,50	512.698,29	-
	2022	-	642,50	-	642,50	577.945,67	899,53
	2021	1.140,25	2.996,75	10,00	4.147,00	2.569.872,25	857,55
	2020	1.157,00	3.007,50	-	4.162,50	2.695.593,00	896,29

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.29
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Robusta
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata2 (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	2,50	31,20	-	33,70	17.556,24	562,70
2	Pino	-	44,13	-	44,13	30.855,70	699,20
3	Ulu Manna	-	91,20	-	391,20	435.210,00	1.112,50
4	Seginim	-	11,57	-	11,57	6.936,79	599,55
5	Air Nipis	-	320,05	-	320,05	300.686,98	939,50
6	Kedurang	40,55	254,90	-	295,45	250.617,68	983,20
7	Kedurang Ilir	-	9,99	-	9,99	6.476,17	648,20
8	Kota Manna	-	3,82	-	3,82	2.503,25	655,30
9	Pasar Manna	-	1,57	-	1,57	1.244,23	792,50
10	Bunga Mas	-	5,54	-	5,54	3.420,40	617,40
11	Manna	-	3,00	-	3,00	1.886,10	628,70
	Jumlah	43,05	1.076,97	-	1.120,02	1.057.393,52	981,82
	2023	2,50	1.051,47	-	1.053,97	877.511,80	2,50
	2022	2,50	1.051,47	-	1.053,97	959.927,97	912,94
	2021	153,95	2.528,25	21,00	2.703,20	2.051.913,00	811,59
	2020	148,45	2.531,30	-	2.700,70	2.047.099,60	808,73

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Tabel 2.30
Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa
Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				Produksi (Kg)	Rata2 (Ton)
		TBM	TM	TT/TR	Jumlah		
1	Pino Raya	-	151,94	-	151,94	193.480,40	1.273,40
2	Pino	-	41,12	-	41,12	56.558,50	1.375,45
3	Ulu Manna	-	26,90	-	26,90	34.001,60	1.264,00
4	Seginim	-	41,30	-	41,30	34.289,33	830,25
5	Air Nipis	-	63,55	-	63,55	71.195,07	1.120,30
6	Kedurang	-	33,98	-	33,98	24.618,51	724,50
7	Kedurang Ilir	-	17,72	-	17,72	18.092,12	1.021,00
8	Kota Manna	-	35,89	-	35,89	39.565,14	1.102,40
9	Pasar Manna	-	21,70	-	21,70	25.200,21	1.161,30
10	Bunga Mas	-	46,50	-	46,50	52.114,88	1.120,75
11	Manna	-	101,52	-	101,52	105.073,20	1.035,00
	Jumlah	-	582,12	-	582,12	654.188,94	1.123,80
	2023	-	582,12	-	582,12	947.608,35	-
	2022	-	582,12	-	582,12	651.566,92	1.119,30
	2021	115,55	789,00	9,50	914,05	893.665,00	1.132,66
	2020	125,35	798,00	-	923,35	877.913,85	1.102,91

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

C. Rencana dan Realiasi Anggaran

Secara rinci dukungan pendanaan dan realisasi anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan periode RENSTRA 2021-2026 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.31
Rencana Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	Rencana Anggaran Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765,536,380					755,047,166					96,62					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0					0 -					0					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83,880,000					78,808,166					93,95					
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13,550,000					13,355,000					98,56					
Penyediaan jasa administrasi keuangan	281,800,000					279,800,000					99,29					
Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,167,000					13,167,000					100					
Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kerja	10,425,000					10,425,000					100					
Penyediaan alat tulis kantor	52,500,000					52,500,000					100					
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	5,010,000					5,010,000					100					
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8,672,000					8,672,000					100					
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	69,422,380					66,200,000					95,35					
Penyediaan Makanan dan Minuman	20,960,000					20,960,000					100					
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	206,150,000					206,150,000					100					

Penetapan Angka Kredit Penyuluh	0					-0					0					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198,866,000					180,503,661					90,76					
Pembangunan gedung Kantor	0 -					0 -					0					
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0					-0					0					
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	0					-0					0					
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	95,468,000					95,468,000					100					
Pengadaan mebeleur	0					0					0					
Penataan Halaman Gedung Kantor	0					0					0					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17,128,000					16,978,000					99,12					
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86,270,000					68,057,661					78,88					
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0					0					0					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	0					0					0					
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0					0					0					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0					0					0					
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	0					0					0					
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	96,196,000					93,133,000					96,81					
Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0					0					0					

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0				0					0					
Penyusunan pelaporan prognosis Realisasi Anggaran	0				0					0					
Penyusunan (RKA/DPA)	0				0					0					
Penyusunan Laporan Barang akhir tahun	0				0					0					
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(LAKIP)	0				0					0					
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	0				0					0					
Penataan dan Penyusunan laporan inventaris barang	22,452,000				22,452,000					100					
Penyusunan Laporan Keuangan	6,229,000				6,229,000					100					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran	67,515,000				64,452,000					95,46					
Program Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	280,200,000				277,413,000					99,00					
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	0				0					0					
Penyusunan Profile OPD	0				0					0					
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD dan DAK	0				0					0					
Pengolahan, Updating Dan Analisis Data Dan Statistik Daerah	280,200,000				277,413,000					99,00					
Penyusunan LPPD	0				0					0					
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	0				0					0					
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	0				0					0					

Peningkatan kemampuan lembaga petani	0					0					0					
peningkatan sistem Insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	0					0					0					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	766,045,946					761,645,945					99,42					
Monitoring , evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	16,975,000					14,575,000					85,86					
pengembangan intensifikasi padi, palawija	0					0					0					
pengembangan diversifikasi tanaman	0					0					0					
pengembangan perbenihan perbibitan	637,004,350					637,004,350					100					
pengembangan sistem informasi pasar	9,875,000					7,875,000					79,74					
Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	0					0					0					
peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	57,061,596					57,061,595					100					
Penyusunan Data Base Alsintan	0					0					0					
Pengembangan sistem informasi dan statistik pertanian dan tanaman hortikultura	0					0					0					
Pemetaan Rekomendasi pemupukan untuk tanaman kelapa sawit	0					0					0					
Peningkatan Kapasitas Aparatur Perkebunan dalam rangka pembangunan perkebunan	0					0					0					

berkelanjutan																
Fasilitasi pembiayaan pertanian	45,130,000					45,130,000					100					
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	452,415,000					209,425,000					46,29					
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	0					0					0					
Penyuluhan dan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna	0					0					0					
Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	0					0					0					
monitoring, evaluasi dan pelaporan	0					0					0					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	23,755,000					23,755,000					100					
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	269,850,000					268,985,000					99,67					
pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan	0					0					0					
fasilitasi, inventarisasi dan identifikasi serta penanggulangan kasus gangguan usaha perkebunan	158,810,000					158,685,000					99,92					
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,792,899,500					2,792,720,560					99,99					

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	0					0					0					
Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan	2,636,547,000					2,636,476,660					99,99					
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	37,889,000					37,781,000					99,99					
Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Sentra Produksi	36,349,000					36,349,000					100					
Perluasan Areal Tanam	0					0					0					
Pengembangan Desa Mandiri Benih	0					0					0					
Pembinaan dan penguatan kelompok penangkar benih padi	0					0					0					
Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman	82,114,500					82,113,900					99,99					
pengadaan benih bermutu dan bersertifikat	0					0					0					
Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian	0					0					0					
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	106,634,100					106,634,100					100					
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular	106,634,100					106,634,100					100					
Pelayanan Kesehatan Hewan, Monitoring dan survellians penyakit hewan	0					0					0					
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	120,009,000					120,009,000					100					
pembibitan dan perawatan ternak	99,499,000					99,499,000					100					
Pengembangan Agribisnis peternakan	20,510,000					20,510,000					100					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0					0					0					

Pengadaan Mesin Absensi	0					0					0					
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0					0					0					
Penyusunan RENSTRA	0					0					0					
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	0					0					0					
Penyusunan ANJAB Dan ABK	0					0					0					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	0					0					0					
Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP)	0-					0					0					
Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	0-					0					0					
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	23,270,000					23,270,000					100					
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	23,270,000					23,270,000					100					
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	91,319,001					91,279,000					99,99					
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	38,660,500					38,660,500					100					
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	0					0					0					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	52,658,501					52,618,500					99,92					

Penyuluhan kapasitas kelembagaan penyuluh (BPP)	0-					0-					0					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		17.510.251.000	22,435,848,380	23,739,377,839	15,963,877,000		17.210.345.000	14.408.630.856	15,259,806,194	16.098.800.485		98,28	82,28	64,28	100,84	- 0.02
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		385.000.000	245.000.000	245.000.000	150.000.000		177,183,000	179.631.796	137,971,900	104,998,024		46.02	73.31	42,85	69,99	- 0.16
Sub kegiatan Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan		100.000.000	0	0	0		0		0	0		0	0	0	0	-0
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	70.000.000	60.000.000	25.000.000		42,165,000	33.124.500	9,764,500	19,440,340		60,23	47.32	32,40	77,76	- 0.23
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		175.000.000	175.000.000	185.000.000	125.000.000		135,018,000	146.507.296	128,207,400	85,557,684		77.15	83.71	46,24	68,44	- 0.14
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.872.596.800	20,593,393,180	21,696,877,839	14.636.877.000		14.345.652.800	13.710.042.742	14.573.061.043	15,199,863,181		96,45	66.57	70,05	103,84	0.00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.822.596.800	20,263,693,180	21,276,877,839	14.276.877.000		14.456.332.200	13.383.267.742	14.035.579.043	14,516,377,081		97.52	66.04	68,22	101,67	1.00

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		344.800.000	314.700.000	400.000.000	350.000.000		279,125,000	311.775.000	529.560.000	672,560,000		80.95	99.07	132,39	192,16	0.34
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		9.400.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		9,400,000	10.000.000	0	0		100.00	100.00	0	0	1.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000		5,000,000	5.000.000	7.992.000	10,926,100		100.00	100.00	109,26	109,26	0.30
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		21.367.000	18.525.000	25.000.000	20.000.000		21,367,000	60.725.000	21.685.000	18,870,000		100.00	327.80	86,74	94,35	- 0.04
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		21.367.000	18.525.000	25.000.000	20.000.000		21,367,000	60.725.000	21.685.000	18,870,000		100.00	327.80	86,74	94,35	- 0.04
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.786.000	205.550.000	227,500,000	150.000.000		3,782,800	4.000.000	0	0		99.91	1.94	0	0	- 1.00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny		0	100.000.000	120.000.000	50.000.000		0-	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3.786.800	5.550.000	7.500.000	10.000.000		3,782,800	4.000.000	0	0		99.91	72.07	0	0	- 1.00

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0	100.000.000	100.000.000	90.000.000		0-	0	0	0		0	0	0	0	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.036.000.	320.380.200	400.000.000	375.000.000		190,863,284	312.883.280	462.678.143	577,431,880		113.58	97.65	115,66	153,98	0.45
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60.632.000	60.737.200	100.000.000	125.000.000		60,547,000	123.342.800	235.909.660	303,520,214		99.85	203.07	235,90	242,81	0.71
Sub keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		25.000.000	0	0	0		21,524,000	0	0	0		86.10	0	0	0	- 1.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		182.404.000	259.643.000	300.000.000	250.000.000		108.792,284	189.540.480	226.768.483	273,911,666		59.64	73.00	75,58	109,56	0.36
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah		0	775.000.000	825.000.000	300.000.000		0-	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	500.000.000	500.000.000	250.000.000		0-	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0	125.000.000	125.000.000	50.000.000		0-	0	0	0		0	0	0	0	0

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	50.000.000	200.000.000	0		0-	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	50.000.000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	50.000.000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		63.984.800	85.000.000	98.000.000	95.000.000		54,635,808	74.896.117	0	0		85.38	88.11	0	0	- 1.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik		63.984.800	65.000.000	78.000.000	85.000.000		54,635,808	74.896.117	0	0		85.38	115.22	0	0	- 1.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0	20.000.000	20.000.000	10.000.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		34.904.000	193.000.000	222.000.000	227.000.000		34,895,000	66.451.921	64.410.108	197,637,400		99.97	34.43	29,00	87,06	0.78
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		29.954.000	33.000.000	50.000.000	50.000.000		29,945,000	39.391.921	64.410.108	96,932,400		99.96	119.37	128,82	192,86	0.48

Operasional atau Lapangan																
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.950.000	10.000.000	22.000.000	27.000.000		4,950,000	7.060.000	0	20,705,000		100.00	70.60	0	0	0.61
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	50.000.000	150.000.000	150.000.000		0-	20.000.000	0	80.000.000		0	40.00	0	0	0.59
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	50.000.000	0	0		0-	0	0	0		0	0	0	0	0-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.619.950.000	2.820.000.000	1.115.000.000,00		893,852,600	1.718.452.263	1,592,327,577	440.927.300		68.82	106.80	56,46	39,54	- 0.21
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		470.000.000	294.950.000	800.000.000	500.000.000,00		262,017,800	92.138.000	910.450.627	428.394.100		55.74	31.23	113,80	85,67	0.18
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		120.000.000	70.000.000	500.000.000	200.000.000,00		68,750,000	50.000.000	620.285.600	0		57.29	71.42	124,05	0	- 1.00
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		350.000.000	224.950.000	300.000.000	300.000.000,00		193,267,800	42.138.000	290.165.027	428.394.100		55.21	18.73	96,72	142,79	0.30

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		0	200.000.000	925.000.000	75.000.000,00		0	1.078.969.663	14.998.710	12.533.200		0	539.48	1,61	16,71	- 0.77
Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		0	50.000.000	225.000.000	50.000.000,00		0	710.953.000	14.998.710	12.533.200		0	1421,90	6,66	25.06	- 0.74
Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		0	150.000.000	700.000.000	25.000.000,00		0	368.016.663	0	0		0	245.34	0	0	- 1.00
Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Kegiatan Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota Lain		12.075.000.000	1.075.000.000	1.075.000.000	520.000.000,00		631,834,800	547.344.600	666.878.240	0		5.23	5091.57	62,03	0	- 1.00
Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		12.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000,00		631,834,800	547.344.600	666.878.240	0		5.26	5473.44	66,68	0	- 1.00

Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		75.000.000	75.000.000	75.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		9.750.000.000	4.280.000.000	3.549.007.741	2.275.000.000,00		6,536,192,518	10.946.999.506	9.956.814.975	8.325.605.431		67.03	255.77	280,55	365,96	0.08
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		650.000.000	450.000.000	514.006.741	595.000.000,00		701,649,000	199.546.000	303.127.030	1.616.636.027		107.94	44.34	58,97	271,70	0.32
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B		400.000.000	200.000.000	200.000.000	500.000.000,00		528,564,000	199.546.000	245.064.030	184.124.300		132.14	99.77	122,53	36,82	- 0.30
Sub Keg. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B		250.000.000	100.000.000	120.000.000	25.000.000,00		173,085,000	0	0	0		69.23	0	0	0	- 1.00
Sub Keg. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		0	150.000.000	94.006.741	50.000.000,00		0-	0	58.063.000	0		0	0	61,76	0	- 1.00

Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		0	-	100.000.000	20.000.000		0-	0	0	1.317.605.596		0	0	0	6.588,02	1.00
SubKeg. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan		0		0	0		0-	0	0	20.342.131		0	0	0	100	1.00
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		0		0	0		0-	0	0	94.564.000		0	0	0	100	1.00
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		9.100.000.000	3.680.000.000	3.035.000.000	1.680.000.000,00		5,834,543,518	10.747.453.506	9.653.687.945	6.708.969.404		64.11	292.50	318,07	399,34	0.05
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		2.000.000.000	1.250.000.000	150.000.000	200.000.000,00		0-	300.000.000	1.200.000.000	0		0	24.00	800,00	0	- 1.00
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		1.000.000.000	300.000.000	120.000.000	120.000.000,00		0-	0	600.000.000	0		0	0	800,00	0	1.00
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		3.000.000.000	1.250.000.000	400.000.000	500.000.000,00		4,486,671,400	5.831.180.200	7.853.687.945	3.356.334.404		149.55	466.49	1963,42	671,26	- 0.09
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		1.000.000.000	300.000.000	120.000.000	120.000.000,00		0-	0	0	600.000.000		0	0	0	500,00	1.00

Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage		0	100.000.000	100.000.000	75.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		0	100.000.000	120.000.000	50.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		500.000.000	100.000.000	1.900.000.000	250.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		1.000.000.000	100.000.000	100.000.000	115.000.000,00		1,347,872,118	2.166.469.000	0	124.910.000		134.78	2166,49	124,91	108,61	- 0.55
Sub Keg. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		600.000.000	180.000.000	25.000.000	250.000.000,00		0	2.449.804.306	0	2.627.725.000		0	1361.00	0	1051,09	0.02
Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		0	150.000.000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		0	150.000.000	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	-

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		250.000.000	325.000.000	300.000.000	95.000.000,00		88,300,000	456.097.094	218.040.683	454.389.671		35.32	140.33	72,68	478,30	0.73
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	200.000.000	175.000.000	50.000.000,00		67,500,000	297.554.000	0	286.266.300		33.75	148.77	0	572,53	0.62
Sub Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		200.000.000	200.000.000	175.000.000	50.000.000,00		67,500,000	297.554.000	0	0		33.75	148.77	0	0	- 1.00
Sub keg. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0			0		0	0	0	286.266.300		0	0	0	100	1.00
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		50.000.000	75.000.000	105.000.000	25.000.000,00		20,800,000	58.165.094	0	0		41.60	77.55	0	0	- 1.00

Sub Keg. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		50.000.000	75.000.000	105.000.000	25.000.000,00		20,800,000	39.975.000	0	0		41.60	53.33	0	0	- 1.00
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	25.000.000	75.000.000	25.000.000		0	103.378.000	203.173.580	149.221.100		0	413.51	270,89	596,88	0.13
Sub Keg. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		0	25.000.000	75.000.000	25.000.000		0	103.378.000	203.173.580	149.221.100		0	413.51	270,89	596,88	0.13
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		0	25.000.000	52.000.000	15.000.000		0	58.165.094	14.867.103	18.902.271		0	59.46	28,59	126,01	- 0.31
Sub Keg. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0	25.000.000	52.000.000	15.000.000		0	18.190.094	14.867.103	18.902.271		0	72.76	28,59	126,01	0.01
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		775.000.000	550.000.000	669.000.000	100.000.000,00		249,350,000	49.982.000	0	0		3.21	9.09	0	0	- 1.00
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		775.000.000	550.000.000	669.000.000	100.000.000,00		249,350,000	49.982.000	0	0		3.21	9.09	0	0	- 1.00

Sub Keg. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		500.000.000	300.000.000	394.000.000	50.000.000,00		114,900,000	49.982.000	0	0		22.98	16.66	0	0	- 1.00
Sub keg. Pencegahan penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		175.000.000			0		134,450,000	0	0	0		76.82	0	0	0	- 1.00
Sub Keg. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		50.000.000	150.000.000	175.000.000	25.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	-0
Sub Keg. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		50.000.000	100.000.000	100.000.000	25.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		0	150.000.000	125.000.000	90.000.000,00		0	36.622.600	0	0		0	24.41	0	0	- 1.00
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	150.000.000	125.000.000	90.000.000,00		0	36.622.600	0	0		0	24.41	0	0	- 1.00

Sub Keg. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		0	50.000.000	20.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		0	50.000.000	30.000.000	20.000.000,00		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		0	50.000.000	75.000.000	50.000.000,00		0	36.622.600	0	0		0	73.24	0	0	- 1.00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		788.907.200	642.250.000	1.130.000.000	195.000.000,00		326,586,000	185.987.000	353.482.852	163.933.100		41.39	28.96	31,28	84,06	- 0.21
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		788.907.200	642.250.000	1.130.000.000	195.000.000,00		326,586,000	126.000.000	0	163.933.100		41.39	19.61	0	84,06	- 0.21
Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		210.309.200	192.250.000	350.000.000	75.000.000,00		242,250,000	29.987.000	0	74,640,000		115.18	15.60	0	99,52	- 0.32
Sub Keg. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		100.000.000	60.000.000	110.000.000	30.000.000,00		49,436,000	0	0	89,293,100		49.43	0	0	0	0

Sub Keg. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		487.598.000	340.000.000	450.000.000	30.000.000,00		34,900,000	30.000.000	0	0		7.15	8.82	0	0	0
Sub Keg. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		0	50.000.000	120.000.000	30.000.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
Sub Keg. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		0	-	100.000.000	30.000.000		0	0	0	0		0	0	0	0	0.22

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Fokus pelayanan dinas dalam mencapai peningkatan produksi, produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan di bidang pertanian dan pangan adalah para pelaku dan pemangku kepentingan dalam sektor pertanian, termasuk petani, pekebun, peternak, masyarakat umum, dan industri terkait yang berkumpul dalam wadah kelompok sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah, seperti penyediaan bantuan bibit, pelatihan teknologi budidaya, akses permodalan, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas mereka.

Tabel 2.32
Kelembagaan Pertanian
di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Kelompok Tani	Gabungan Kelompok Tani	Koperasi Tani	UPJA	Penangkar Benih TPH
1	Pino Raya	232	21	1	5	-
2	Pino	172	15	-	5	1
3	Ulu Manna	103	11	-	5	-
4	Kota Manna	74	5	-	5	-
5	Pasar Manna	28	3	-	2	-
6	Manna	156	10	1	3	-
7	Bunga Mas	105	9	-	3	-
8	Seginim	288	21	-	5	4
9	Air Nipis	173	10	1	3	-
10	Kedurang Ilir	113	13	2	14	-
11	Kedurang	168	19	-	7	1
	Jumlah	1.612	137	5	57	6

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024

Dengan memfokuskan pelayanan kepada kelompok-kelompok ini, dinas pertanian dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi, memberdayakan pelaku usaha, dan mewujudkan kesejahteraan petani dan peternak.

2.1.5. Mitra Pelayanan

Mitra pelayanan Dinas Pertanian adalah para pemangku kepentingan di luar pemerintahan yang bekerja sama untuk mendukung dan meningkatkan sektor pertanian, seperti kelompok tani, perusahaan agribisnis (produsen benih, pupuk, pestisida), pedagang, distributor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan penyedia jasa keuangan. Kemitraan ini penting untuk menyediakan modal, teknologi, akses pasar, serta bahan baku dan hasil pertanian yang berkualitas, sehingga dapat memajukan pertanian secara berkelanjutan. Mitra pelayanan Dinas Pertanian meliputi :

- a. Kelompok Tani dan Petani: Sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dan penerima manfaat dari program-program dinas pertanian
- b. Perusahaan Agribisnis: Produsen benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta industri pengolahan hasil pertanian.
- c. Pedagang dan Distributor: Menghubungkan hasil pertanian dari petani ke konsumen akhir, baik di pasar lokal maupun internasional.
- d. Lembaga Keuangan: Bank dan lembaga pembiayaan lainnya yang memberikan akses modal kepada petani.
- e. Lembaga Pendidikan dan Penelitian: Perguruan tinggi dan balai penelitian yang menyediakan informasi, teknologi, dan inovasi baru di bidang pertanian.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi yang fokus pada pemberdayaan petani dan pengembangan pertanian berkelanjutan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD): Unit di bawah dinas yang menyediakan layanan teknis, penyuluhan, dan pengujian di bidang pertanian.

Adapun peran dari mitra dalam Pelayanan Dinas Pertanian sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menginformasikan dan memperkenalkan teknologi pertanian baru serta praktik-praktik terbaik kepada petani.
- b. Membantu petani dalam memasarkan produk pertanian mereka secara efisien;
- c. Menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan pestisida dengan kualitas baik;
- d. Membantu petani mendapatkan akses ke permodalan untuk mengembangkan usaha tani mereka;
- e. Membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani melalui pelatihan dan demplot.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

Permasalahan dan isu strategis adalah kondisi krusial yang belum terselesaikan, memiliki dampak jangka panjang, dan memerlukan perhatian serta penanganan khusus dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun organisasi.

Hasil identifikasi, evaluasi dan telaah terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian disimpulkan bahwa masih ditemukannya permasalahan dan isu yang sama dalam rangka pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi pekerjaan rumah dan perlu mendapatkan perhatian dan keseriusan dalam penanganannya.

Permasalahan dan Isu strategis tersebut telah dikelompokkan berdasarkan sub sektor yang ditangani yakni sebagai berikut :

a. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Regulasi pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas sesuai tata ruang wilayah dan Rencana Aksi pengembangan kawasan belum ditaati;	1	Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi bahan makanan pokok beras sementara ketersediaan lahan semakin berkurang;
2	Fluktuasi harga komoditas pertanian yang cenderung tidak stabil;	2	Banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal;
3	Rendahnya kualitas SDM kelompok tani dan kelembagaannya	3	Menurunnya minat dan kesadaran generasi muda untuk terjun di bidang pertanian.
4	Lemahnya posisi tawar petani atas hasil produksi sebagai akibat panjangnya rantai distribusi serta belum adanya kepastian/jaminan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani;		
5	Penguasaan lahan petani yang semakin sempit, bahkan di beberapa wilayah petani hanya sebagai penggarap hal ini berakibat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan;		
6	Keterbatasan akses permodalan dan lemahnya penguasaan teknologi di tingkat petani karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulitnya petani mengadopsi teknologi yang berdampak pada penerapan budidaya yang belum sesuai rekomendasi		
7	Perubahan iklim global mengakibatkan laju serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) masih belum terkendali secara optimal;		
8	Persepsi dan kesadaran petani dalam penggunaan bibit unggul masih rendah.		

b. Sub Sektor Perkebunan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Budidaya perkebunan dengan pola monokultur menyebabkan degradasi lahan;	1	Hilirisasi produk perkebunan;
2	Perubahan iklim global menyebabkan fluktuasi hasil panen dan meningkatkan risiko gagal panen;	2	Deforestasi lahan;
3	Ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat menurunkan kualitas tanah dan berdampak pada hasil panen;	3	Pembangunan perkebunan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memenuhi standar pasar global;
4	Lahan Perkebunan mengalihfungsikan lahan sawah;	4	Sektor perkebunan sering menjadi penopang ekonomi pada saat krisis.
5	Lahan Perkebunan merambah hutan kawasan		

c. Sub Sektor Peternakan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Kesadaran peternak masih kurang terhadap potensi penyebaran penyakit ternak;	1	Ancaman wabah penyakit ternak;
2	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan	2	Isu stunting yang disebabkan karena kurangnya asupan protein hewani;
3	Pola pemeliharaan ternak secara intensif belum menjadi kebiasaan;		

4	Minimnya SDM Peternakan yang berkompeten;		
5	Rendahnya kemampuan peternak dalam penyediaan bahan pakan yang cukup dan berkualitas ;		
6	Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Higienitas dan sanitasi pengolahan produk hasil peternakan;		
7	Terbatasnya Petugas Kesmavet yang bersertifikat kompetensi;		
8	Pelaku usaha peternakan terkendala pada ketersediaan bahan baku produksi dan permodalan		

d. Sub Sektor Sarana dan Prasana Pertanian

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Dokumen perencanaan pengembangan prasarana pertanian belum tersedia;	1	Kkurangnya akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan dan informasi;
2	Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang telah masuk pada umur tidak produktif;	2	Alih fungsi lahan sawah secara tidak terkendali;
3	Distribusi pupuk subsidi masih belum memenuhi kaidah 3T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran);	3	Keterbatasan irigasi dan jalan usaha tani dapat menghambat pemanfaatan lahan secara optimal
4	Minat petani dalam memanfaatkan program AUP dan AUTS sangat rendah;		

e. Sub Sektor Penyuluhan

Permasalahan		Isu Strategis	
1	Ketersediaan tenaga Penyuluh Pertanian yang masih kurang;	1	Penarikan tenaga penyuluh pertanian dari status pegawai daerah menjadi pegawai kementerian pertanian;
2	Lemahnya Kompetensi dan kapasitas penyuluh;	2	Isu lingkungan dan ketahanan pangan yang memerlukan adaptasi teknologi dan inovasi pertanian berkelanjutan;
3	Keterbatasan kelembagaan penyuluhan dalam hal pemahaman terhadap regulasi, ketersediaan anggaran dan dukungan sarana prasarana;	3	Rendahnya kompetensi penyuluh, terutama dalam literasi digital dan penggunaan teknologi
4	Akses informasi dan teknologi masih terbatas		

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

Dalam upaya mewujudkan pencapaian target tujuan jangka pendek dan jangka menengah perangkat daerah, maka dalam penyusunan RENSTRA ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strenghts/kekuatan, Weakness/ Kelemahan, Oportunity/Peluang and threats/tantangan*).

Kesimpulan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dimaksud sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.33
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

TANTANGAN	PELUANG
1. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke peruntukan lain sebagai akibat pertambahan penduduk dan kebutuhan Pembangunan; 2. Infrastruktur dasar pertanian perlu perbaikan dan peningkatan dan beberapa perlu dilaksanakan pembangunan; 3. Kurangnya minat generasi muda untuk bertani dan penuaan populasi petani menjadi kendala besar bagi keberlanjutan sektor pertanian; 4. Penerapan teknologi pertanian oleh petani belum optimal; 5. Fluktuasi harga pasar komoditas pertanian yang tidak stabil; 6. Kemampuan pembiayaan daerah masih rendah.	1. Permintaan pasar terhadap produk pertanian akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi manusia; 2. Meningkatnya kesadaran konsumen akan makanan sehat dan ramah lingkungan membuka peluang untuk pertanian organik dan produk berkualitas tinggi; 3. Inovasi teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 4. Platform e-commerce dan ekosistem pertanian digital menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan efisiensi pemasaran 5. Dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam RENSTRA ini target waktunya adalah 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan berdasarkan pada kajian terhadap isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pertanian sebagai perwujudan Misi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Ekonomi Untuk Daya Saing Daerah”**.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja yang menjadi alat pemicu bagi organisasi untuk mencapai tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut **“Meningkatnya Kesejahteraan Petani”** dengan *goal* yang dihasilkan adalah **Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)**.

Secara rinci Target Kinerja dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode RENTRA Tahun 2025-2029 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Ekonomi Untuk Daya Saing Daerah	Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	112,50	113,75	114,80	115,50	116,75	118,00

3.3. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun strategi sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Penguatan ketersediaan sarana dan infrastruktur pertanian;
- c. Penguatan kelembagaan dan akses pemodalan;
- d. Perlindungan lahan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- e. Pengamanan hasil produksi dan jaminan akses pasar produk pertanian;
- f. Pengembangan kompetensi aparatur.
- g. Penguatan data dan informasi pertanian yang akurat dan kredibel;

3.4. Arah Kebijakan

Strategi sebagaimana tersebut diatas, akan dilaksanakan dengan beberapa langkah kebijakan agar proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu, Arah kebijakan dalam RENSTRA Tahun 2025-2029 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan benih/bibit komoditas pertanian unggul, bermutu dan bersertifikat;
- b. Perlindungan dan pengendalian gangguan usaha yang disebabkan serangan hama dan/atau penyakit dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan potensi lainnya sebagai sumber alternative penghasil pangan;
- d. *Blueprint* (Cetak Biru) rencana pengembangan prasarana/ infrastruktur pertanian sesuai karakteristik wilayah;
- e. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian sesuai kewenangan;
- f. Modernisasi teknologi panen dan pasca panen;
- g. Optimalisasi pelayanan dan penguatan inovasi layanan;
- h. Peremajaan tanaman yang tidak produktif;
- i. Optimalisasi Bank Pakan ternak;
- j. Penerapan perlindungan lahan dengan penerapan Reward dan Punishment lahan pertanian dilindungi;
- k. Penambahan dan peningkatan kompetensi Tenaga teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan fungsional lainnya;
- l. Pelaksanaan Sekolah Lapang dan penerapan panca usaha tani;
- m. Pemetaan dan pengendalian wilayah rawan bencana dan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- n. Memberikan kemudahan akses petani terhadap sumber

- pembiayaan dan investasi dibidang pertanian;
- o. Implementasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2028;
- p. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya;
- q. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Petani dan Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) lainnya.
- r. Penguatan prasarana pelayanan seperti alat transportasi untuk mempersempit rentang kendali;
- s. Relokasi Rumah Potong Hewan ke lokasi yang lebih strategis dan berstandar SNI dan usulan pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Restribusi Pelayanan;
- t. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas PETANI MILENIAL;
- u. Updating data base pertanian secara berkala;
- v. Penguatan lingkungan ASN yang padat inovasi;
- w. Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Relevansi pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2025-2029

Visi			
Membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Misi ke-2			
Mendorong diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, industri kreatif, dan pariwisata dalam meningkatkan daya saing daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah Ekonomi Untuk Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;	1. Penyediaan benih/bibit komoditas pertanian unggul, bermutu dan bersertifikat; 2. Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan potensi lainnya sebagai sumber alternative penghasil pangan; 3. Peremajaan tanaman yang tidak produktif; 4. Pelaksanaan Sekolah Lapang dan Penerapan panca usaha tani

		Penguatan ketersediaan sarana dan infrastruktur pertanian;	1. <i>Blueprint</i> (Cetak Biru) rencana pengembangan prasarana/ infrastruktur pertanian sesuai karakteristik wilayah; 2. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian sesuai kewenangan.
		Penguatan kelembagaan dan akses pemodalan;	1. Optimalisasi Bank Pakan ternak; 2. Memberikan kemudahan akses petani terhadap sumber pembiayaan dan investasi dibidang pertanian; 3. Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Petani dan Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) lainnya; 4. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas PETANI MILENIAL;
		Perlindungan lahan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;	1. Modernisasi teknologi panen dan pasca panen; 2. Pengendalian lahan pertanian pangan dengan penerapan reward and punishment lahan pertanian dilindungi; 3. Pemetaan dan pengendalian wilayah rawan bencana dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
		Pengamanan hasil produksi dan jaminan akses pasar produk pertanian;	1. Perlindungan dan pengendalian gangguan usaha yang disebabkan serangan hama dan/atau penyakit dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 2. Relokasi Relokasi Rumah Potong Hewan ke lokasi yang lebih strategis dan berstandar SNI dan usulan pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Restribusi Pelayanan;
		Pengembangan kompetensi aparatur.	1. Optimalisasi pelayanan dan penguatan inovasi layanan; 2. Penambahan dan peningkatan kompetensi Tenaga teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan fungsional lainnya; 3. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya 4. Penguatan prasarana

			pelayanan seperti alat transportasi untuk mempersempit rentang kendali; 5. Penguatan lingkungan ASN yang padat inovasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengawasan dan pengendalian	1. Implementasi RADKSB Kab. BS Tahun 2024-2028
		Penguatan data dan informasi pertanian yang akurat dan kredibel;	1. Updating data pertanian secara berkala; 2. Penguatan Pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

TABEL 3.3
TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya daya saing daerah sektor pertanian		Nilai tukar usaha petani (NTUP) (%)	111,61	113,29	114,96	116,64	118,31	119,99	121,66	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	105,75	107,65	109,55	111,45	113,35	115,25	117,15	
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	105	106,50	108	109,50	111	112,50	114	
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	125,50	127	128,50	130	131,50	133	134,50	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	110,20	112	113,80	115,60	117,40	119,20	121	
		Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	63	71	75	79	80	85	

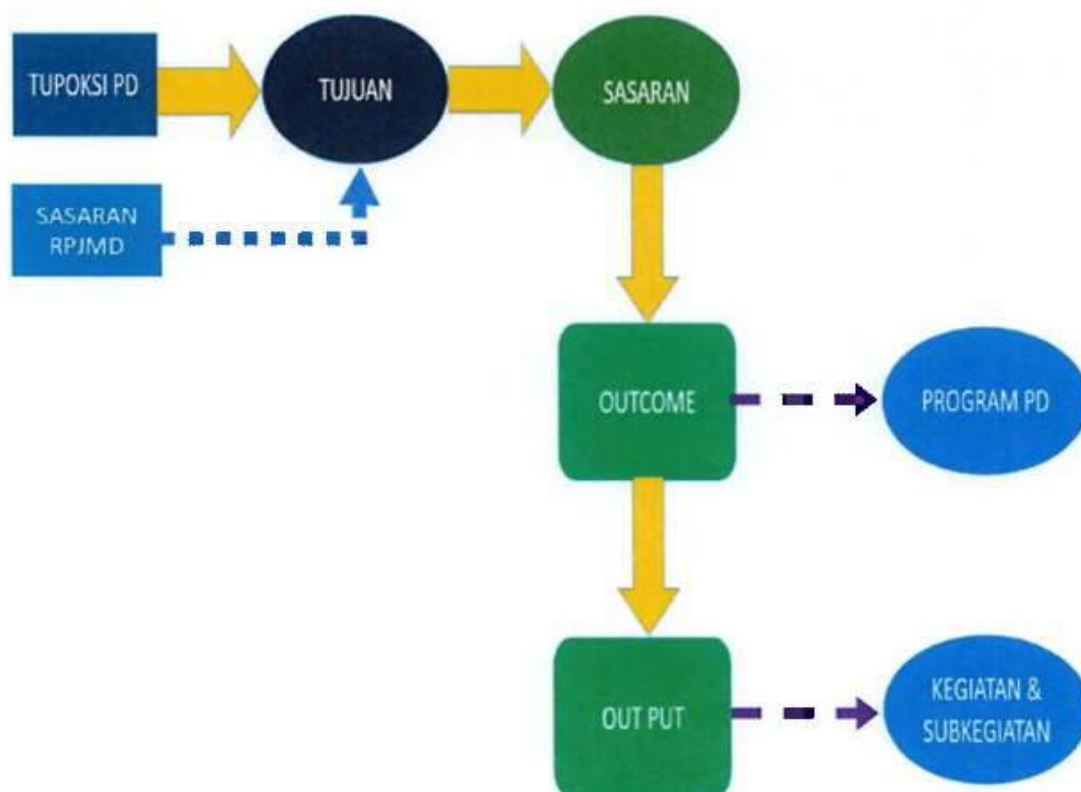
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RENSTRA Tahun 2025-2029, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah membuat rancangan program dan kegiatan dengan penetapan target indikator kinerja serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada ***Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.***

Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana gambar dibawah ini :

**Gambar 3. Kerangka Perumusan Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan**



Secara rinci matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pendanaan berdasarkan target capaian output kinerja dalam periode RENSTRA 2025-2029 sebagaimana tertera pada table berikut ini :

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.249.780.000,00		21.356.029.374,00		21.462.809.521,00		21.570.123.569,00		21.677.974.187,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.974.965.000,00		16.051.029.374,00		16.136.143.521,00		16.315.123.569,00		16.301.062.187,00	
Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	63	71	15.974.965.000,00	75	16.051.029.374,00	79	16.136.143.521,00	80	16.315.123.569,00	85	16.301.062.187,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		725.000.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	105,75	107,65	109,55	600.000.000,00	111,45	625.000.000,00	113,35	650.000.000,00	115,25	700.000.000,00	117,15	725.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	105	106,50	108		109,50		111		112,50		114		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	110,20	112	113,80		115,60		117,40		119,20		121		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	125,50	127	128,50		130		131,50		133		134,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.299.815.000,00		3.405.000.000,00		3.376.666.000,00		3.040.000.000,00		3.311.912.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	7.630,30	7.630,30	7.630,30	3.299.815.000,00	7.630,30	3.405.000.000,00	7.630,30	3.376.666.000,00	7.630,30	3.040.000.000,00	7.630,30	3.311.912.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					465.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00	

Meningkatnya Pegendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveillance Penyakit dari 5 PHMS) (%)	100	100	100	465.000.000,00	100	490.000.000,00	100	515.000.000,00	100	490.000.000,00	100	515.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	15	20		40		60		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan (Hektar)	190	190	190		190		190		190		190		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	10	20	50.000.000,00	40	50.000.000,00	60	50.000.000,00	80	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					610.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		725.000.000,00		525.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20	30	40	610.000.000,00	50	485.000.000,00	60	485.000.000,00	70	725.000.000,00	80	525.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	10	20	40		60		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					21249780000.00		21356029374.00		21462809521.00		21570123569.00		21677974187.00	

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian							
- Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya daya saing daerah sektor pertanian				Nilai tukar usaha petani (NTUP) (%)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)		
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		
					Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)		
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terjaminnya mutu dan keamanan sarana pertanian (Bibit/benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) yang beredar, dan digunakan petani	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
				Terkendalinya penyimpanan dalam pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana pertanian.	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpenuhinya kebutuhan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak berkualitas	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terselenggaranya pembangunan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Infrastruktur pertanian yang memadai	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pegendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
					Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Survey/lanse Penyakit dari 5 PHMS) (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terjaminnya kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular, serta penegakan kembali aktivitas normal di suatu wilayah pasca-wabah dengan mencegah penyebaran lebih lanjut	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD PUSKESWAN MANNA DAN SULAU)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terjaminnya keamanan produk hewan dari peternakan hingga ke konsumen untuk melindungi kesehatan masyarakat	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Hektar)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terkelolanya lahan pertanian dan produksi komoditi pertanian dari dampak negatif bencana	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Terselenggaranya prosedur penerbitan izin usaha dibidang pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
		Nilai AKIP OPD			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Nilai AKIP OPD		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Optimalnya ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	3.27.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Optimalnya Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Optimalnya Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Optimalnya Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Optimalnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Optimalnya Pengadaan Barang atau Bangunan Lainnya yang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				21.249.780.000,00		21.356.029.374,00		21.462.809.521,00		21.570.123.569,00		21.677.974.187,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15.974.965.000,00		16.051.029.374,00		16.136.143.521,00		16.315.123.569,00		16.301.062.187,00		
Nilai AKIP OPD	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	60	71	15.974.965.000,00	75	16.051.029.374,00	79	16.136.143.521,00	80	16.315.123.569,00	85	16.301.062.187,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				185.000.000,00		187.000.000,00		195.000.000,00		208.000.000,00		225.000.000,00		
Optimalnya ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2	4	185.000.000,00	4	187.000.000,00	4	195.000.000,00	4	208.000.000,00	4	225.000.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			4
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	25.000.000,00	10	27.000.000,00	10	30.000.000,00	10	32.000.000,00	10	35.000.000,00		
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	22.000.000,00	4	25.000.000,00		
3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	42.000.000,00	4	45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				85.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00	4	90.000.000,00	4	95.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.858.965.000,00		15.225.029.374,00		15.270.143.521,00		15.403.123.569,00		15.330.062.187,00		
Optimalnya Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14.881.974.670	59	13.858.965.000,00	61	15.225.029.374,00	63	15.270.143.521,00	65	15.403.123.569,00	67	15.330.062.187,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.583.965.000,00		14.941.029.374,00		14.975.143.521,00		15.099.123.569,00		15.015.062.187,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14.881.974.670	59	13.583.965.000,00	61	14.941.029.374,00	63	14.975.143.521,00	65	15.099.123.569,00	67	15.015.062.187,00		
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4	250.000.000,00	4	255.000.000,00	4	260.000.000,00	4	265.000.000,00	4	270.000.000,00		
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	20.000.000,00		
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	20.000.000,00	8	22.000.000,00	8	25.000.000,00		
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		54.000.000,00		60.000.000,00		64.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalnya Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	54.000.000,00	4	60.000.000,00	4	64.000.000,00	4	70.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
3.27.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				35.000.000,00		37.000.000,00		40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	35.000.000,00	4	37.000.000,00	4	40.000.000,00	4	42.000.000,00	4	45.000.000,00		
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	8	15.000.000,00	8	17.000.000,00	8	20.000.000,00	8	22.000.000,00	8	25.000.000,00		
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				260.000.000,00		62.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00		120.000.000,00		
Optimalnya Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	260.000.000,00	4	62.000.000,00	4	85.000.000,00	4	87.000.000,00	4	120.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5		5		7		7		10			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	7	70.000.000,00	7	70.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				310.000.000,00		312.000.000,00		315.000.000,00		317.000.000,00		320.000.000,00		
Optimalnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	15	310.000.000,00	15	312.000.000,00	15	315.000.000,00	15	317.000.000,00	15	320.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		40		40		40					
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	4		4		4		4					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00	40	200.000.000,00		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	4	10.000.000,00	4	12.000.000,00	4	15.000.000,00	4	17.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				750.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	750.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		0		0		0		0			
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	300.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00		
3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12		4		4		4		4			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	12	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				496.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		
Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	496.000.000,00	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00	30	96.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50	50		50		50		50		50			
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	50	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				600.000.000,00		625.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		725.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	105,75	109,55	600.000.000,00	111,45	625.000.000,00	113,35	650.000.000,00	115,25	700.000.000,00	117,15	725.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	105	108		109,50		111		112,50		114			
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	110,20	113,80		115,60		117,40		119,20		121			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	125,50	128,50		130		131,50		133		134,50			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terjaminnya mutu dan keamanan sarana pertanian (Bibit/benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) yang beredar, dan digunakan petani	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4	190.000.000,00	4	190.000.000,00	4	190.000.000,00	4	190.000.000,00	4	190.000.000,00		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	500	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	1,5	2		2		2		2		2			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	1,5	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	500	1.000	40.000.000,00	1.000	40.000.000,00	1.000	40.000.000,00	1.000	40.000.000,00	1.000	40.000.000,00		
Terkendalnya penyimpangan dalam pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana pertanian.	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00	4	250.000.000,00		
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2		2		2		2		2			
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				130.000.000,00		155.000.000,00		180.000.000,00		205.000.000,00		230.000.000,00		
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	2	2	130.000.000,00	2	155.000.000,00	2	180.000.000,00	2	205.000.000,00	2	230.000.000,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak berkualitas	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	3	175.000.000,00	3	175.000.000,00		
	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	10	10		10		10		10		10			
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	10	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				3.299.815.000,00		3.405.000.000,00		3.376.666.000,00		3.040.000.000,00		3.311.912.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	7.630,30	7.630,30	3.299.815.000,00	7.630,30	3.405.000.000,00	7.630,30	3.376.666.000,00	7.630,30	3.040.000.000,00	7.630,30	3.311.912.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				559.815.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terselenggaranya pembangunan pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3	3	559.815.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00		
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	1											
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				99.815.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3	3	99.815.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				210.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	0	1	210.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				2.740.000.000,00		3.055.000.000,00		3.026.666.000,00		2.690.000.000,00		2.961.912.000,00		
Tersedianya Infrastruktur pertanian yang memadai	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4	2.740.000.000,00	4	3.055.000.000,00	4	3.026.666.000,00	4	2.690.000.000,00	4	2.961.912.000,00		
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	2		4				4		3			
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0					1		2		2			
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0			1									
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	10				10				10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4		4		4		4					
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	4		4		4		4					
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00		
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00		
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00		
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				500.000.000,00		0,00		486.666.000,00		0,00		500.000.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	10	500.000.000,00		0,00	10	486.666.000,00		0,00	10	500.000.000,00		
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				200.000.000,00		515.000.000,00		0,00		600.000.000,00		371.912.000,00		
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	2	200.000.000,00	4	515.000.000,00		0,00	4	600.000.000,00	3	371.912.000,00		
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		
terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	0	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00	4	480.000.000,00		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				0,00		0,00		500.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0		0,00		0,00	1	500.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0		0,00	1	500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				465.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00		490.000.000,00		515.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS) (%)	100	100	465.000.000,00	100	490.000.000,00	100	515.000.000,00	100	490.000.000,00	100	515.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	10	20		40		60		80		80			
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Terjaminnya kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular, serta penegakan kembali aktivitas normal di suatu wilayah pasca-wabah dengan mencegah penyebaran lebih lanjut	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	0	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00	4	250.000.000,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	0	4	150.000.000,00	4	175.000.000,00	4	200.000.000,00	4	225.000.000,00	4	250.000.000,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner (UPTD PUSKESWAN MANNA DAN SULAU)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		165.000.000,00		165.000.000,00		
Terjaminnya keamanan produk hewan dari peternakan hingga ke konsumen untuk melindungi kesehatan masyarakat	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4	4	215.000.000,00	4	215.000.000,00	4	215.000.000,00	4	165.000.000,00	4	165.000.000,00		
	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	4		4		4		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	0	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100		100		100		100					
	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan (Hektar)	190	190		190		190		190					
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terkelolanya lahan pertanian dan produksi komoditi pertanian dari dampak negatif bencana	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	190	250.000.000,00	190	250.000.000,00	190	250.000.000,00	190	250.000.000,00	190	250.000.000,00		
	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	380		380		380		380					
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	4		4		4		4					
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	0	380	100.000.000,00	380	100.000.000,00	380	100.000.000,00	380	100.000.000,00	380	100.000.000,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0	190	50.000.000,00	190	50.000.000,00	190	50.000.000,00	190	50.000.000,00	190	50.000.000,00		
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	0	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	20	50.000.000,00	40	50.000.000,00	60	50.000.000,00	80	50.000.000,00	100	50.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya prosedur penerbitan izin usaha dibidang pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
3.27.06.2.01.0002 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				610.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		725.000.000,00		525.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	20	40	610.000.000,00	50	485.000.000,00	60	485.000.000,00	70	725.000.000,00	80	525.000.000,00	3.27.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian	
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	10	40		60		80		90		100			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				610.000.000,00		485.000.000,00		485.000.000,00		725.000.000,00		525.000.000,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	5	610.000.000,00	5	485.000.000,00	5	485.000.000,00	5	725.000.000,00	5	525.000.000,00		
	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	180	200		200		200		200		200			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	107	150		150		150		150		150			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00	10	75.000.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	180	200	85.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00	200	100.000.000,00		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				250.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		350.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	5	5	250.000.000,00	5	110.000.000,00	5	110.000.000,00	5	350.000.000,00	5	150.000.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	2	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	107	150	50.000.000,00	150	50.000.000,00	150	50.000.000,00	150	50.000.000,00	150	50.000.000,00		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	0	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		

4.2. Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Disamping upaya pencapaian target kinerja organisasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, dalam penandaan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting maka dari Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan diatas, terdapat sub-sub kegiatan yang turut mendukung upaya pencapaian target RPJMD dalam rangka turut berpartisipasi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dan pendapatan masyarakat.

Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;*
2. *Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;*
3. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian Embung;*
4. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian Dam Parit;*
5. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian Jalan Usaha Tani;*
6. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya;*
7. *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;*
8. *Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;*
9. *Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;*
10. *Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;*
11. *Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan;*
12. *Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;*
13. *Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;*
14. *Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;*
15. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;*
16. *Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.*

TABEL 4.4

**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian				
1.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
2.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
			3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
3.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	
4.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
5.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian									
2.	Nilai tukar usaha petani (NTUP)	%	111,61	113,29	114,96	116,64	118,31	119,99	121,66	
3.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentase	105,75	107,65	109,55	111,45	113,35	115,25	117,15	
4.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentase	105	106,50	108	109,50	111	112,50	114	
5.	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	125,50	127	128,50	130	131,50	133	134,50	
6.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persentase	110,20	112	113,80	115,60	117,40	119,20	121	

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK berfungsi sebagai penopang IKU yang menjadi target utama, penetapan IKK dilakukan untuk mengukur bagaimana setiap aktivitas atau program berkontribusi pada pencapaian IKU tersebut. Dengan kata lain, IKK adalah metrik yang lebih detail untuk melihat kinerja dalam menjalankan proses, sementara IKU adalah metrik untuk melihat kinerja dalam mencapai hasil akhir yang lebih besar.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
2.	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveilance Penyakit dari 5 PHMS)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	positif	Persentase	105,75	107,65	109,55	111,45	113,35	115,25	117,15	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	60	63	71	75	79	80	85	
5.	Peningkatan Produksi Hortikultura	positif	Persentase	105	106,50	108	109,50	111	112,50	114	
6.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	positif	Persentase	110,20	112	113,80	115,60	117,40	119,20	121	
7.	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan	positif	Hektar	190	190	190	190	190	190	190	
8.	Peningkatan Produksi Perkebunan	positif	%	125,50	127	128,50	130	131,50	133	134,50	
9.	Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	positif	Unit	10	10	10	10	10	10	10	
10.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	positif	Ton	1.057.393,52	1.073.254,42	1.089.353,24	1.105.693,54	1.122.278,94	1.139.113,12	1.150.504,26	
11.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Sawit	positif	Ton/Tahun	397.901.826,95	403.870.354,35	409.928.409,67	416.077.336,81	422.318.495,85	428.653.273,29	432.939.806,02	
12.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	positif	Ton	654.188,94	664.001,77	673.961,80	684.071,23	694.332,30	704.747,28	711.794,75	
13.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	positif	Ton	620.395,46	629.701,39	639.146,91	648.734,12	658.465,13	668.342,11	675.025,53	
14.	Indeks Pertanaman (IP) Padi	positif	Kali	1,47	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	
15.	Jumlah Produksi Padi	positif	Ton	48.746	49.477,19	50.219,35	50.972,64	51.737,23	52.513,29	53.038,42	
16.	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	positif	%	30	35	45	55	65	75	85	

17.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	positif	%	69,5	71	73	75	77	79	79	
18.	Persentase Ketersedian Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	positif	%	74,2	75	77	79	80	83	85	
19.	Jumlah Produksi Jagung	positif	Ton	16.565	16.813,48	17.065,68	17321..66	17.581,49	17.845,21	18.023,66	
20.	Produksi Kambing	positif	Ton/Tahun	8,44	8,52	8,61	8,70	8,78	8,87	8,91	
21.	Produksi Kerbau	positif	Ton/Tahun	20,4	20,60	20,81	21,02	21,23	21,44	21,55	
22.	Produksi Sapi Potong	positif	Ton/Tahun	126,1	127,36	128,63	129,92	131,22	132,53	133,20	
23.	Rasio Ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Terhadap Desa Binaan	positif	Rasio	.1;1.9	.1;1.8	.1;1.6	.1;1.5	.1;1.3	.1;1.2	.1;1	
24.	Sertifikat NKV	positif	Unit	1	1	2	2	3	3	4	
25.	Sertifikat Pra NKV	positif	Unit	10	15	20	25	30	35	35	
26.	Jumlah Koperasi Tani dan KEP yang Terbentuk dan Beroperasi	positif	Unit	3	5	6	7	8	9	10	

Tabel 4.7
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Per Sub Sektor

NO	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2030
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura								
	- Padi	ton/thn	48.746,00	49.477,19	50.219,35	50.972,64	51.737,23	52.513,29	53.038,42
	- Jagung	ton/thn	16.565,00	16.813,48	17.065,68	17.321,66	17.581,49	17.845,21	18.023,66
	- Cabe	ton/thn	25,10	26,38	27,79	28,46	29,88	30,31	31,45
2	Sub Sektor Perkebunan								
	- Kelapa Sawit	ton/thn	397.901.83	403.870.35	409.928.41	416.077.34	422.318.50	428.653.27	432.939.81
	- Karet	ton/thn	620.39	629.70	639.15	648.73	658.47	668.34	675.03
	- Kelapa	ton/thn	654.19	664.00	673.96	684.07	694.33	704.75	711.79
	- Kopi	ton/thn	1.057.39	1.073.25	1.089.35	1.105.69	1.122.28	1.139.11	1.150.50
3	Sub Sektor Peternakan								
	- Sapi Potong	ton/thn	126,10	127,36	128,63	129,92	131,22	132,53	133,20
	- Kerbau	ton/thn	20,40	20,60	20,81	21,02	21,23	21,44	21,55
	- Kambing	ton/thn	8,44	8,52	8,61	8,70	8,78	8,87	8,91
	- Persentase Tingkat Pengendalian PHMS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	- Pra NKV	Unit	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
	- NKV	Unit	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
4	Kelembagaan Penyuluhan								
	Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Unit	6 Madya 4 Pratama	8 Madya 2 Pratama	10 Madya 0 Pratama	1 Utama 9 Madya	2 Utama 8 Madya	3 Utama 7 Madya	4 Utama 6 Madya
	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persen	30%	35%	45%	55%	65%	75%	85%
	Rasio ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap desa binaan	Orang/Desa	1 : 1,9	1 : 1,8	1 : 1,6	1 : 1,5	1 : 1,3	1 : 1,2	1 : 1
	Jumlah koperasi tani dan KEP yang terbentuk	Unit	3	5	6	7	8	9	10

	dan beroperasi								
5	Sarana Dan Prasarana								
	Persentase Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	Persen	74,20	75%	77%	79%	81%	83%	85%
	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	Kali/thn	69,50	71%	73%	75%	77%	79%	79%
	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Persen	1,47	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
6	Sekretariat								
	Nilai AKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB	BB

5.1. Kesimpulan

Dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya pembangunan pertanian yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan dari seluruh sub sektor.

RENSTRA ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029.

Implementasi RENSTRA ini tetap mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang, lintas sektor serta peran aktif masyarakat, dengan memperhatikan kewenangan, tanggung jawab serta tugas dan fungsi masing-masing elemen sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.

Sikap yang mengedepankan ego sektoral dan kurangnya kepekaan terhadap lingkungan kerja senantiasa terus diingatkan kepada seluruh lini untuk dihilangkan agar sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan akan menjadi *fashion* organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pengawalan implementasi RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 harus menjadi pedoman setiap unit kerja dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, termasuk secara kreatif mendesain inovasi sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan 5 (lima) tahun kedepan;

3. Monitoring dan evaluasi secara berkala mutlak dilakukan untuk mengetahui sejauhmana progres pencapaian kinerja yang dicapai serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka menetapkan rencana tindak pengendalian yang akan ditempuh;
4. Diperlukan konsep yang terarah dan terukut dalam manajemen resiko atas rencana pencapaian target kinerja;
5. Dokumen turunan dari RENSTRA ini harus tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran yang termuat dalam RENSTRA ini;
6. Revisi/perubahan terhadap RENSTRA ini dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan berikut ini :
 - a. Terdapat aturan yang mengamanatkan perubahan RENSTRA Perangkat Daerah;
 - b. RENSTRA sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pergantian Kepala Daerah yang menyebabkan perlunya perubahan sebagian atau keseluruhan kandungan/ substansi RENSTRA; dan/atau
 - d. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau perubahan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 09 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

